

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN
DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SAPARUDIN, S.Pd.I

NIM. 500582024

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

Saparudin

saparudinismail@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pelaksanaan pemberian Program Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung dilakukan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut yang mempunyai sasaran perorangan ataupun keluarga miskin yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kabupaten tersebut. Penyebaran penduduk di Kabupaten Tana Tidung tidak merata, sehingga hal ini dapat mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan di masing-masing kecamatan disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan tingkat kepadatan dan penyebaran penduduk yang tidak merata yang berdampak pada kesejahteraan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mengatasi kerentanan sosial permasalahan yang ada dimasyarakat salah satu cara yang diberikan adalah dengan mengalokasikan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam jenis belanja daerah yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (7) PP 58 Tahun 2005.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, dan untuk mengidentifikasi hambatan dalam mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan instrumen penelitian wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung berjalan cukup lancar. Walaupun masih belum dilakukan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku tetapi hampir semua tahap kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial sudah dilaksanakan. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Hambatan yang dihadapi dalam mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung adalah Sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung kurang optimal, pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah masih menggunakan data penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tahun sebelumnya, dan masih banyak penerima bantuan yang belum diverifikasi secara faktual datanya, masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan hibah dan bantuan sosial, bahkan dana bantuan sosial terkesan mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme.

Kata kunci : Dana hibah, dana bantuan sosial, implementasi, kebijakan, pengelolaan hibah

ABSTRACT

DISTRIBUTION POLICY IMPLEMENTATION GRANT AND SOCIAL ASSISTANCE
IN THE DISTRICT TANA TIDUNG 2014

Saparudin
saparudinismail@gmail.com

Graduate Program
Open University

Implementation of Grant Assistance Program and Social Assistance in Tana Tidung performed as one of the poverty reduction programs in the region that have targeted poor individuals and families who are in the territory of the district administration. Population distribution in Tana Tidung uneven, so that this can lead to the gap in the level of welfare of each district in addition to other factors that influence it. With the spread of population density and uneven impact on welfare is the responsibility of the Government of Tana Tidung in implementing programs and activities that are organizing the affairs of the authority. Tana Tidung government in order to address social vulnerability problems that exist in the community one way award is budgeted shopping areas in the form of grants and social assistance as found in the type of shopping areas contained in Article 27 paragraph (7) Regulation 58 of 2005.

This study aimed to ascertain the implementation of the program of grants and social assistance in Tana Tidung, knowing what factors influence the implementation of grants and social assistance in Tana Tidung, and to identify bottlenecks in the delivery mechanism of grants and social assistance in Tana Tidung. The method used is descriptive qualitative, in-depth interviews with research instruments. The results of this study are Policy Implementation grants and social assistance in Tana Tidung went pretty smoothly. Although it still has not been done in accordance with the laws in force but nearly all stages of proposal and grant management activities and social assistance have been implemented. Then some of the factors that affect the implementation of the grant program and social assistance is communication, resource capabilities, attitudes executor, bureaucratic structure, and the size and environmental policy objectives. Obstacles encountered in the mechanism of providing grants and social assistance in Tana Tidung is socialization program grants and social assistance in Tana Tidung less than optimal, the implementation of social assistance programs and grants they use data of beneficiaries of grants and social aid the previous year, and many recipients aid that has not verified the factual data, there is still overlap in the distribution of grants and social assistance, social assistance funds even impressed educate people corrupt and nepotism.

Keywords: grants, social assistance funds, implementation, management, policy grants

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implentasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 30 Mei 2016

Yang Menyatakan

(SAPARUDIN, S.Pd.I)
NIM. 500582024

PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implentasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan
Sosial di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014

Penyusun TAPM : Saparudin, S.Pd.I

NIM : 500582024

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/ Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing II



Dr. R. Benny Agus Pribadi, MA
NIP.

Pembimbing I



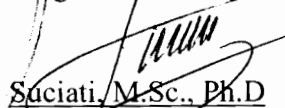
Dr. M. Riduan Karim, SE. MM.
NIP.

Ketua Bidang Akademik
Ilmu Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN

Nama : Saparudin, S. Pd.I
 NIM : 500582024
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan
 Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 26 Juni 2016

W a k t u :

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr. Sofjan Arifin, M. Si (.....)

Penguji Ahli : Prof. Dr. Martani Huseini, M. Si (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Riduan Karim, SE, M.M (.....)

Pembimbing II : Dr. R. Benny Agus Pribadi, M.A (.....)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul: “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014”. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi sempurnanya tesis ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa mulai dari penelitian hingga selesainya penyusunan tesis ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bupati Tana Tidung yang telah memberikan Izin belajar untuk mengikuti Program Pascasarjana di Universitas Terbuka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung beserta seluruh staf yang telah memberikan data dan informasi yang penulis perlukan dalam penelitian.
3. Ibu Suciati, M. sc, Ph. D, Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
4. Kepala UPBJJ- UT Samarinda beserta Staf yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pendidikan Jarak jauh sehingga menjadi Cikal Bakal Berdirinya UPBJJ UT- Kalimantan Utara di Kota Tarakan
5. Bapak Dr. Sofjan Arifin, M. Si selaku Direktur Program Pascasarjana UPBJJ UT- Kalimantan Utara

6. Bapak Dr. M. Riduan Karim, SE, M.M, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Dr. R. Benny Agus Pribadi, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
8. Prof. Dr. Martani Huseini, M. Si, selaku Penguji ahli yang telah banyak memberikan kontribusi demi kesempurnaan Tesis ini
9. Bapak Uus Rusmanda, A. Ks, M. HP, selaku atasan penulis yang telah memberikan peluang untuk mengikuti Program Pascasarjana.
10. Rekan-rekan seperjuangan Para Mahasiswa Pascasarjana UT yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi pada program S2 ini.
11. Orang tua, Istri, Anak-anak, keluarga, dan rekan kerja tercinta yang telah memberikan Motivasi yang tinggi kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan penulis kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun sprituil, hanyalah berupa doa kepada Allah SWT, agar semua bantuan, dorongan, dan semangat yang diberikan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan menjadi solusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tarakan,.....Juni 2016

SAPARUDIN
NIM. 500582024

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Saparudin, S.Pd.I
NIM : 500582024
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Bunyu, 14 Januari 1978

Riwayat Pendidikan:

- ✓ Lulus dari SDN 005 Bunyu, pada tahun 1991
- ✓ Lulus dari SMPN Bunyu, pada tahun 1994
- ✓ Lulus dari Madrasah Aliyah Alkahiraat Bunyu, pada tahun 1997
- ✓ Lulus S1 dari STAIN DATOKARAMA Palu, Sulteng pada tahun 2002

Riwayat Pekerjaan :

- ✓ Tahun 2002 menjadi Guru Pendidikan Agama Islam, Sesayap, Kabupaten Bulungan sekarang Kabupaten Tana Tidung
- ✓ Tahun 2008 s/d tahun 2012 menjadi Kasubbag Program dan Data pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung
- ✓ Tahun 2012 s/d sekarang menjadi Kasubbag Keagamaan pada Sekretariat daerah Kabupaten Tana Tidung
- ✓ Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Plt. Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Tarakan, 30 Mei 2016

Saparudin, S.Pd.I
NIM. 500582024

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Kebijakan Publik.....	8
a. Pengertian kebijakan Publik.....	8
b. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	22
c. Model Edwards III.....	24
d. Model Van Meter dan Van Horn	29
e. Grindle.....	32
f. faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan implementasi kebijakan publik	35
1). Implementasi kebijakan Model George C. Edwart III.....	35
2). Implementasi Kebijakan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn.	40
3). Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmania dan Paul Sabatier	45
4). Implementasi kebijakan Model Merilrr S. Grindle	47
5). Implementasi Kebijakan Model Eugene Bardach	49
6). Implementasi Kebijakan Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun.	50

2. Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial.....	54
a. Tujuan Pemberian Dana Hibah	60
b. Bentuk Hibah	61
c. Kriteria Mekanisme pemberian bantuan hibah terbetu uag yang bersumber dari APBD dari pemerintah daerah berdasarkan peraturan- perundangan.....	62
d. Kriteria dan syarat minimal Pemberian hibah.....	61
B. Peneliti Terdahulu.....	65
C. Kerangka Berfikir.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Desain Penelitian.....	71
B. Sumber Data dan Pemilihan Informan.....	71
1. Wawancara	72
2. Observasi.....	72
3. Dokumentasi	72
4. Informan.....	73
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	73
D. Instrumen Penelitian.....	73
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	74
F. Metode Analisis Data	74
G. Fokus Penelitian.....	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	78
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	78
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Tidung.....	78
a. Visi dan Misi Kabupaten Tanah Tidung	78
1). Visi Kab. Tanah Tidung	78
2). Misi Kab. Tanah Tidung.....	78
3). Geografis dan Administratif Kab. Tana Tidung.....	79
4). Demografi.....	83
B. Hasil Penelitian.....	84
1. Struktur dan Tugas Organisasi Pelaksanaan	92
2. Kualitas Sumber Daya Pelaksana	93
3. Sumber Pendanaan	95

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tanah Tidung	96
a. Faktor penghambat	97
b. Faktor Pendukung	98
C. Pembahasan	100
1. Komunikasi	100
2. Sumber Daya	102
3. Disposisi	105
4. Struktur Birokrasi	106
5. Implementasi Kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial	108
6. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi kebijakan	109
7. Hubungan sumber Daya dengan Implementasi kebijakan	110
8. Hubungan Sikap Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan	111
9. Hubungan Birokrasi dengan Implementasi Kebijakan	112
10. Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
Lampiran	xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ideal Kebijakan Publik.....	12
Gambar 2.1. Tahapan Kebijakan Publik	13
Gambar 2.2.Tiga Elemen Sistem Kebijakan.....	14
Gambar 2.3.proses Kebijakan Publik Menurut Easton	16
Gambar 2.4. proses Kebijakan Publik menurut aderson, Dkk	16
Gambar 2.5. proses Kebijakan publik Menurut Dye	17
Gambar 2.6. model analisis kebijakan dunn	18
Gambar 2.7. faktor yang memepengaruhi implementasi kebijakan menurut edwards 3	24
Gambar 2.8. faktor yang memepengaruhi implementasi	36
Gambar 2.9. kerangka berfikir penelitian	70
Gambar 3.1. Ideal Kebijakan Publik.....	75
Gambar 4.1. Tahapan Kebijakan Publik	80
Gambar 4.2.peta administrasi kabupaten dan cakupan wilayah kajian	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kependudukan Kabupaten Tana Tidung.....	2
Tabel 4.1. Nama Dan Luas Wilayah Per-Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu kompleks yang salah satunya yaitu Pulau Kalimantan yang terdiri dari beberapa provinsi diantaranya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten termuda di provinsi Kalimantan Utara, yang disetujui pembentukannya pada sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 juli 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan (Kalimantan Timur), yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia. Sejak tahun 2012, daerah ini memiliki kondisi geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai petani dan nelayan.

Pelaksanaan pemberian Program Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung dilakukan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut yang mempunyai sasaran perorangan ataupun keluarga miskin yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kabupaten tersebut. Usaha pengentasan kemiskinan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut. Berdasarkan data jumlah penduduk di tahun 2015 berjumlah 20.400 jiwa dan penyebaran penduduknya juga belum merata. Permasalahan ini dapat berpengaruh pada perkembangan

tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga harus diatasi melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung (BPS, 2015).

Tabel 1.1 Data Kependudukan Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Sesayap	1016.92	8.226	8.09
2	Sesayap Hilir	1317.53	5.680	4.31
3	Tana Lia	426.8	2.863	6.71
4	Muruk Rian	608,82	1.406	2.31
5	Betayau	1007.65	2.225	2.21
Jumlah		4828.58	20.400	4.22

Sumber: Buku Saku Statistik Kabupaten Tana Tidung 2015

Dilihat dari data jumlah penduduk tahun 2015 untuk kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan tidak merata. Kepadatan masyarakat tertinggi ada di Kecamatan Sesayap dan Tana Lia. Sedangkan terendah di Kecamatan Muruk Rian dan Betayau. Penyebaran ekonomi penduduk yang tidak merata ini dapat mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masing-masing kecamatan disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan tingkat kepadatan dan penyebaran penduduk yang tidak merata yang berdampak pada kesejahteraan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya, selain itu kurangnya sumber daya manusia (SDM) mengakibatkan rendahnya polapikir masyarakat untuk menjadi lebih maju.

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan salah satunya adalah dengan mengalokasikan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Permendagri 13 Tahun

2006) menyebutkan bahwa tujuan belanja daerah hibah dan bantuan sosial merupakan program yang bertujuan untuk :

1. Menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
2. Menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
4. Meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belanja hibah dan bantuan sosial tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk merencanakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mengatasi kerentanan sosial permasalahan yang ada dimasyarakat salah satu cara yang diberikan adalah dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam jenis belanja daerah yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (7) PP 58 Tahun 2005. Hibah dan bantuan sosial, sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 (Permendagri 57 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Permendagri 21 Tahun 2011) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan dana hibah dan bantuan sosial dalam belanja daerah yaitu klasifikasi belanja menurut

program dan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pedoman Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam belanja daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri 32 Tahun 2011) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Permendagri 39 Tahun 2012) tentang Pedoman Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai maksud agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah tidak terkecuali di pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Untuk dapat menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial dalam perda APBD, Permendagri 32 Tahun 2011 dan Permendagri 39 Tahun 2012 mengharuskan kepada daerah termasuk pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk membuat suatu regulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial.

Belanja Hibah dan Bansos merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi banyak perhatian publik. Kedua rekening tersebut memiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat resiko sosial masyarakat serta juga memuat kepentingan politik dalam arti luas. Prinsip dana hibah di bagi menjadi tiga yaitu prinsip pengelolaan dan penggunaan, prinsip pelaksanaan, dan prinsip pertanggungjawaban. Adapun penjelasan dari

masing-masing prinsip sebagai berikut:(1).Prinsip pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah adalah efektif, efisien dan transparan. (2)Prinsip pelaksanaan dana hibah adalah akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya. (3)Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanan pengelolaannya, Hibah dan Bansos telah mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap perencanaan pelaksanaan, pertanggungjawaban serta penatausahaannya. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa daerah menunjukkan terdapat banyak temuan pengendalian dan kepatuhan dalam pengelolaan Hibah dan Bansos. Tidak sedikit juga permasalahan pengelolaan Hibah dan Bansos tersebut membawa Kepala Daerah dan pengelolanya ke dalam pemasalahan hukum.

Dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan Hibah dan Bansos Di Kabupaten Tana Tidung masih dalam kondisi yang tidak jelas. Pertama, penganggaran Hibah dan Bansos yang seharusnya sudah pasti nama penerima dan besarnya, namun tidak sedikit penentuan peruntukan Hibah dan Bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kedua, sebagian dana Hibah dan Bansos dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek (belum ditetapkan siapa penerimanya). Seiring waktu pelaksanaan APBD, baru akan ditentukan peruntukkan dan siapa penerimanya. Berdasarkan survey yang telah dilakukan hal ini juga terjadi di Kabupaten Tana Tidung. Sesuai

pengamatan peneliti mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung tahun 2014. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2014 di Kabupaten Tana Tidung ditemukan beberapa masalah, antara lain : Sosialisasi dan mekanisme penyaluran dana hibah dan bansos kurang optimal, pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah menggunakan data penerima bantuan sosial/hibah tahun 2013, banyak penerima bantuan yang tidak diverifikasi datanya secara faktual, pelaksanaan penerima bantuan dirasakan masih sangat kurang, adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat, masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan hibah atau bantuan sosial, dana bantuan sosial terkesan mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014”.

B. Perumusan Masalah.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang dapat diambil untuk dijadikan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang hendak dicapai dengan berpedoman pada perumusan masalah. Selaras dengan permasalahan permasalahan yang telah dirumuskan, selaras dengan itu maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
2. Menegetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang akan didapat dan menjadi harapan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial dengan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya agar dapat mengetahui efektifitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Tana Tidung

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian. Sedangkan *policy* berasal dari bahasa Latin *politea* yang berarti kewarganegaraan. Karena *policy* dikaitkan dengan pemerintah, maka lebih tepat jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan (Joko, 2009).

Kebijakan publik terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu : kebijakan (*policy*), dan publik (*public*). Kedua kata tersebut terdapat pengertian dari masing – masing “kebijakan” dan ”publik”. Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi (Agustino, 2006).

Istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, menurut Budi Winarmo kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang disesuaikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan (*policy*) yaitu kebijakan Negara, kebijakan yang dibuat Negara. Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bias berupa undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lain (Winarno, 2014).

Secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah (Winarno, 2014). Sedangkan Kebijakan sebagai proses, manajemen kebijakan publik disarankan untuk difahami sebagai proses, dan ditingkat jenis organisasi menurut Nugroho (2003) menyatakan bahwa di tingkat eksekutif dapat dikelompokkan menjadi birokrasi di tingkat pusat, daerah, dan lokal. Di tingkat jenis organisasi dapat dikelompokkan organisasi perencana, seperti Bappenas dan Bappeda, organisasi pelaksana, seperti Departemen dan Dinas Teknis hingga organisasi pengendalian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat, hingga UP3KR, sebuah unit kerja yang melekat pada lembaga

Presiden untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan, atau di masa lalu diberi nama sebagai Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalobang)".

Menurut Suharto (2008), pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda – beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda – beda. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu :

- 1) Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*public interest*)
- 2) Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acap kali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek.
- 3) Usulan tindakan; dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
- 4) Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya, baik manusia maupun bukan manusia.

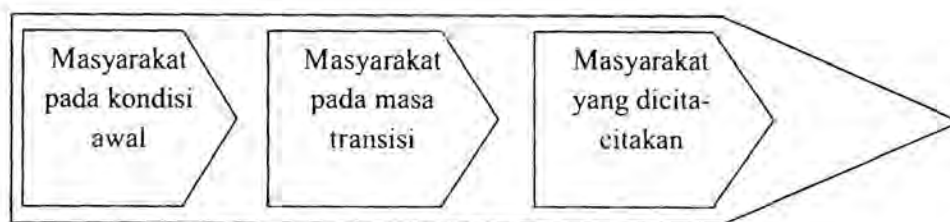
Suwitri (2008), menyatakan bahwa “mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu ;

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. *Taktik* atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan menurut Suharto (2008) menyatakan bahwa ; “Kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah – masalah masyarakat”. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Nugroho (2014), yang menyatakan bahwa definisinya sebagai “segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*public policy is “Whatever governments choose to do or not do. Public policy is what government do, why they do it, an what difference it makes”*). Senada dengan definisi Dye, George C.Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Ditambahkan Riant Nugroho dengan keadaan bangsa Inonesia, kebijakan publik dengan cita – cita yang ideal sebagai berikut ;



Gambar 2.1. Ideal Kebijakan Publik
Sumber ; *Public Policy*, Riant Nugroho tahun 2014

Gambar 2.1. diatas menggambarkan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (*Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, demokrasi dan Keadilan*) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut (Nugroho, 2014).

Pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Wahab, 2008). Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses penyusunan kebijakan publik dalam beberapa tahap. Tujuan membagi seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya tahap penilaian kebijakan yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu

tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan publik dan terminasi atau penghentian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan public menurut Winarno (2014) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2. Tahapan Kebijakan Publik

Sumber : Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) Budi Winarno, tahun 2014

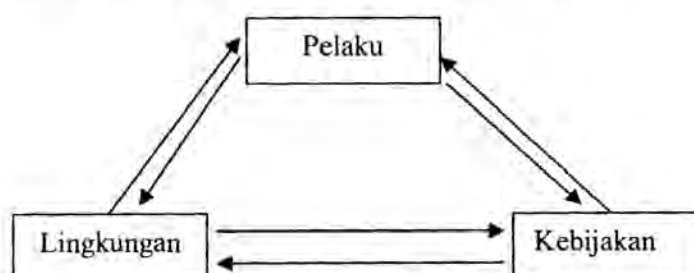
Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
- b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dari poin-poin di atas maka kita bisa menarik benang merah dari definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan

publik adalah “keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. Menurut Subarsono (2005) kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik juga merupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

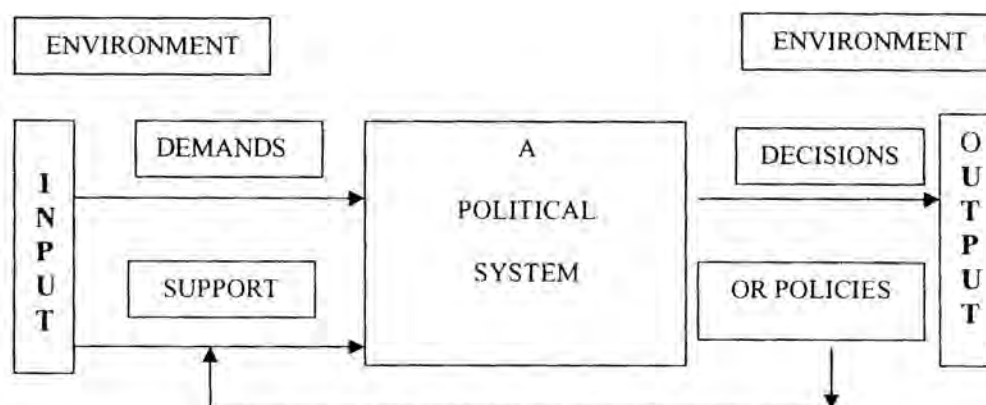
Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*



Gambar 2.2. Tiga Elemen Sistem Kebijakan
Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn (2000)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000) menyatakan, "Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya". Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. David Easton dalam Nugroho (2008) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi.

Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output, seperti digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3. Proses Kebijakan Publik Menurut Easton
Sumber: David Easton dalam Nugroho (2008)

Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Model Easton ini tergolong dalam model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky. Menurut James A. Anderson, dkk. dalam Tilaar dan Nugroho (2008) proses kebijakan melalui tahap-tahap/*stages* sebagai berikut:



Gambar 2.4. Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson, dkk
Sumber: James A. Anderson, dkk. dalam Tilaar dan Nugroho (2005)

Dijelaskan bahwa tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

Stage 1: *Policy agenda*, yaitu *those problems, among many, which receive the serious attention of public officer.*

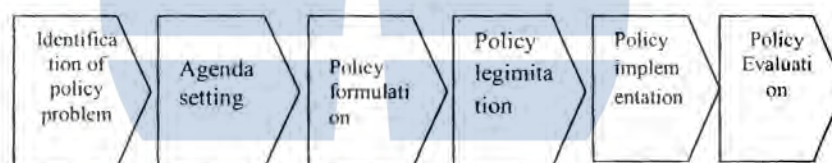
Stage 2: *Policy formulation*, yaitu *the development of pertinent and acceptable proposal courses of action for dealing with problem.*

Stage 3: *Policy adoption*, yaitu *the development of support for a specific proposal so that policy can legitimated or authorized.*

Stage 4: *Policy implementation*, yaitu *application of the policy by the government's administrative machinery to problem.*

Stage 5: *Policy evaluation*, yaitu *effort by the government to determine whether the policy was effective and why, and why not*

Selain Anderson, dkk, pakar lain yang menyampaikan adalah Dye. Dye mengemukakan dalam Tilaar dan Nugroho (2008:189) proses kebijakan publik adalah sebagai berikut :

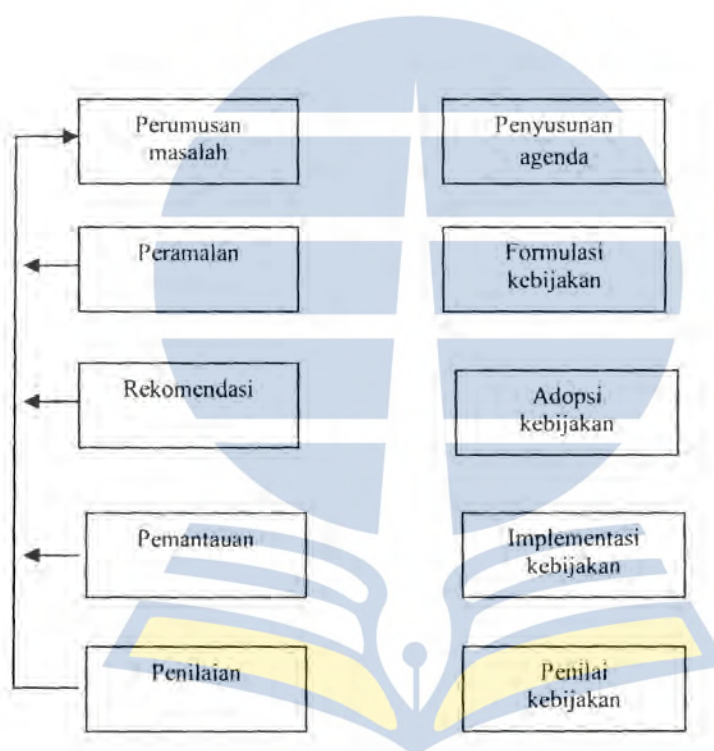


Gambar 2.5. Proses Kebijakan Publik Menurut Dye
Sumber: James A. Anderson, dkk. dalam Tilaar dan Nugroho (2005)

Pada model Dye disampaikan bahwa proses kebijakan Anderson, dkk. mendapatkan satu tambahan tahap sebelum *agenda setting*, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (*agenda setting*) yang terlewatkan oleh Anderson, dkk.. Selain itu Dye juga menggantikan tahap *policy adoption* dengan *policy legitimation*. Pada kedua teori tersebut, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk. dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.

Selain teori proses kebijakan dari Anderson, dkk. dan Dye terdapat teori lain seperti dari William N. Dunn dan Patton & Savicky. Baik Dunn maupun

Patton & Sawicky mengemukakan model-model proses kebijakan yang lebih bersifat siklis daripada tahap-tahap/*stages*. Dunn menambahkan proses *forecasting*, *recommendation*, dan *monitoring*. Hampir sama seperti Anderson, dkk. maupun Dye, Dunn membuat analisis pada tiap tahap dari proses kebijakan dari model Anderson, dkk. dan Dye. Dunn menggambarkan bahwa analisis pada tiap tahap proses kebijakan sebagai berikut.



Gambar 2.6. Model Analisis Kebijakan Dunn

Pada tiap tahap kebijakan Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang semestinya dilakukan. Pada tahap penyusunan agenda/*agenda setting*, analisis yang mesti dilakukan adalah perumusan masalah/*identification of policy problem*. Dalam hal ini Dunn membuat sintesis dari model Anderson, dkk. dan Dye yaitu menggabungkan tahapan antara *identification of problem* dan *agenda setting* dari Dye dengan tahap *policy agenda* dari Anderson. Pada tahap formulasi

kebijakan/*policy formulation*, terdapat langkah analisis yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan/*forecasting*. Dunn menjelaskan bahwa peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Dunn memberi contoh *forecasting* pada kebijakan asuransi kesehatan di AS dengan proyeksi statistik yang menyebutkan bahwa pemerintah AS akan kehabisan dana asuransi kesehatan masyarakat pada tahun 2005 jika tidak ada pendapatan tambahan.

Pada tahap adopsi kebijakan/*policy adoption* yang merupakan tahap yang dikemukakan Anderson, dkk. seharusnya dilakukan analisis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan hasil dari analisis berbagai alternatif kebijakan setelah alternatif-alternatif tersebut diestimasi melalui peramalan (Dunn, 2000). Dunn memberikan contoh rekomendasi kebijakan di AS untuk mengubah batas kecepatan di jalan raya 55 mph dan 65 mph. Satu rekomendasi menjelaskan bahwa undang-undang lalu-lintas yang membatasi kecepatan 55 mph hanya mencegah kematian tak lebih dari 2-3 persen, sehingga rekomendasi itu mengusulkan untuk memakai alokasi dana yang ada untuk hal lain seperti membeli alat deteksi asap daripada mengimplementasikan undang-undang itu dan tanpa mendapatkan hasil yang signifikan.

Pada tahap implementasi kebijakan, Dunn menyarankan agar dilakukan analisis berupa pemantauan/*monitoring*. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada tiap

tahap kebijakan. Dunn memberikan contoh bahwa Biro Sensus di AS menemukan bahwa median dari pendapatan rumah tangga di AS tumbuh dari 43 persen menjadi 46,7 persen sedangkan kelompok pendapatan lain mengalami penurunan. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan, erosi kelas menengah, dan penurunan standar hidup.

Pada tahap evaluasi kebijakan Dunn menyatakan bahwa tahap ini tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan namun juga memberikan klarifikasi sekaligus kritik bagi nilai-nilai yang mendasari kebijakan, serta membantu penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Dalam hal ini evaluasi juga memberikan feedback bagi perumusan masalah, sehingga model Dunn ini juga mengkompromikan model yang diusulkan pertama kali oleh Easton. Menurut Nugroho (2008) model-model kebijakan dari Easton, Anderson, dkk., Dye, Dunn, maupun Patton dan Savicky tersebut di atas memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari *formulasi* menuju *implementasi*, untuk mencapai *kinerja kebijakan*.

Pendapat David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19), menyampaikan bahwa definisi kebijakan publik sebagai "*the autorative allocation of values for the whole society*". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam "*authorities in a political system*" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu

masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dari teori-teori proses kebijakan kita dapat melihat tiga kata kunci yakni “formulasi, “implementasi”, dan “kinerja”. Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mengenai implementasi kebijakan, Nugroho (2008) menyatakan. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.

Melihat bahwa implementasi merupakan tugas yang memakan sumber daya/*resources* paling besar, maka tugas implementasi kebijakan juga sepatutnya mendapatkan perhatian lebih. Terkadang dalam praktik proses kebijakan publik, terdapat pandangan bahwa implementasi akan bisa berjalan secara otomatis setelah formulasi kebijakan berhasil dilakukan. Nugroho (2008) menyatakan *implementation myopia* yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah “Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan dengan sendirinya”. Terkadang sumber daya sebagian besar dihabiskan untuk membuat perencanaan padahal justru tahap implementasi kebijakan yang pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pelaksanaan kebijakan tersebut hari demi hari sehingga menuju kinerja kebijakan. Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi

rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga variabel-variabel yang terkait di dalamnya. Subarsono (2005) menyebutkan beberapa teoritis implementasi kebijakan yang menyebutkan berbagai macam variabel tersebut. Pakar-pakar tersebut antara lain: George C. Edwards III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Cheema dan Rondinelli, dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

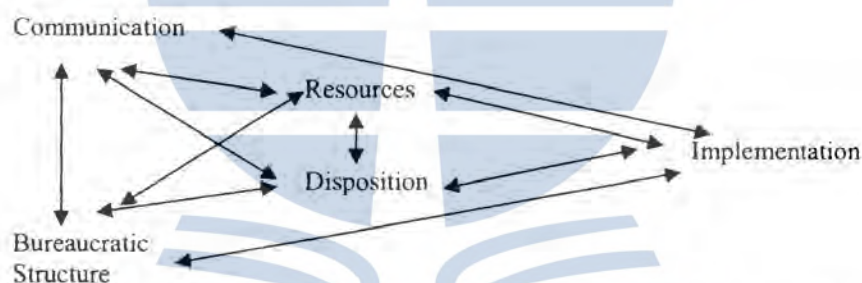
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana

5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

c. Model Edwards III

Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.



Gambar 2.7. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Sumber: Edwards III (1980)

Menurut Edwards (1980) komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten Edwards III menyatakan:

“Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear accurate, and consistent”.

Dalam hal ini Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat keputusan/*decision maker* berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendaknya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/*discretion* pada para implementor karena mereka akan mencoba

menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas serta spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

Mengenai sumber daya, Edwards III (1980: 11) menjelaskan bahwa hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah:

Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.

Tanpa memandang seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapa akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards, sebagaimana disebutkan di atas meliputi staff, informasi, otoritas, dan fasilitas. Selain komunikasi dan sumber daya, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Edwards III (1980) menyatakan:

"If implementors are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when

implementors' attitudes or perspectives differ from the decisionmakers', the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated".

Dalam hal ini Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan. Dicontohkan oleh Edwards III, bahwa banyak negara bagian dan sekolah-sekolah di AS yang tidak mengalokasikan dana bagi anak berkebutuhan khusus meskipun aturan tentang alokasi dana tersebut telah dituangkan dalam *Title I of the Elementary and Secondary Education Act of 1965*. Pelanggaran ini disebabkan oleh sikap negara-negara bagian dan sekolah-sekolah tersebut tidak berminat/*not interested* dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di atas.

Untuk mengatasi kebuntuan implementasi karena adanya resistensi dari pelaksana, Edwards III menawarkan dua alternatif solusi. Alternatif pertama adalah dengan pergantian personel, sedangkan alternatif kedua adalah dengan memanipulasi insentif. Alternatif pertama menurut Edwards III cenderung lebih sulit daripada alternatif kedua. Edwards III (1980) menyatakan :

Changing the personnel in government bureaucracies is difficult, and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors' dispositions is to alter the dispositions of existing implementors through the manipulation of incentives. Since people generally act in their own interest, the manipulation of incentives by high-level policymakers may influence their actions ...

Alternatif kedua ini sering kita jumpai dalam manajemen organisasi. Organisasi yang mengutamakan kinerja seperti di dalam perusahaan seringkali memberikan kenaikan gaji yang berbeda antar karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja lebih bagus akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki kinerja di bawahnya. Dalam bidang pendidikan kita juga melihat misalnya sertifikasi guru dan dosen di Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Peningkatan kesejahteraan ini merupakan wujud reward yang berimbang pada tuntutan untuk peningkatan kinerja dari guru dan dosen. Faktor keempat yang dikemukakan Edwards adalah struktur birokrasi. Edwards III (1980) menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi. Mengenai SOP, Edwards III menjelaskannya sebagai:

“The former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”.

Jika kita *rephrase*, SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. SOP ini sering kita jumpai dalam pelayanan masyarakat pada organisasi-organisasi pelayanan publik. Standarisasi SOP sudah menjadi isu lama pada organisasi swasta/*private sector*, dan kemudian diimplementasikan pula pada organisasi-organisasi pelayanan publik. Contoh yang dapat kita lihat adalah

pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat yang sekarang bahkan sudah memiliki standar waktu pelayanan untuk masing-masing item pelayanan. Di satu sisi SOP ini memberikan sisi positif yaitu kejelasan bagi publik dalam standar pelayanan yang dapat mereka harapkan, sedangkan di sisi lain standar pelayanan yang mekanistik dapat pula membuat publik merasa dibeda-bedakan. Sebagai contoh standar pelayanan untuk pasien di rumah sakit membeda-bedakan pasien yang membayar sendiri, melalui asuransi (semacam Askes), atau melalui tunjangan sosial (semacam Jamkesmas). Mengenai fragmentasi, Edwards III (1980) menjelaskan:

“The latter results primarily from pressures outside bureaucratic units as legislative committees, interest groups, executive officials, state constitutions and city charters, and the nature of broad policies influence the organization of public bureaucracies”.

Dalam bahasa yang lebih singkat, Edwards III (1980: 134) mendefinisikan fragmentasi sebagai

“...the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units”.

Dengan kata lain, fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan pada beberapa unit organisasi. Edwards III (1980) memberikan ilustrasi bagaimana fragmentasi membuat Pemerintah AS menjadi tidak efisien. Dicontohkan bahwa pada masa pemerintahan Carter, Presiden Carter yang mengadakan reformasi pelayanan publik menyatakan,

“There are too many agencies, doing too many things, overlapping too often, coordinating too rarely, wasting too much money – and doing too little to solve real problems”.

d. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005) terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Selanjutnya variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut dijelaskan (Subarsono, 2005):

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

Jika kita berpatokan pada teori yang diajukan oleh Edwards III, maka seperti terlihat di atas, variabel (1) standar dan sasaran kebijakan dapat kita masukkan dalam variabel “komunikasi” dalam model Edwards III. Hal ini karena dari penjelasan yang ada menunjukkan bahwa diperlukan adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi maupun konflik. Variabel (2) sumber daya sejalan dengan variabel “sumber daya” pada model Edwards III, yaitu mencakup SDM dan non-SDM. Variabel (3) hubungan antar organisasi dapat kita masukkan dalam variabel “struktur organisasi” dari model Edwards III. Variabel (4) karakteristik agen pelaksana dan variabel (6)

disposisi implementor, dapat kita masukkan pada variabel "disposisi" dalam model Edwards III. Hal ini dikarenakan variabel (4) membicarakan tentang 'norma-norma' dan 'pola-pola hubungan' yang terjadi pada implementor merupakan dapat mengacu pada preferensi nilai atau sikap yang ada pada implementor dalam menyikapi nilai-nilai yang dibawa oleh kebijakan.

Dari keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang agak berbeda barangkali adalah variabel (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi, yang tidak terdapat dalam model Edwards III. Pada variabel (5) ini terlihat bahwa model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn juga mempertimbangkan faktor eksternal. Dilihat dari teori sistem kebijakan dari Dye yang melibatkan tiga elemen dalam sistem kebijakan, maka faktor sosial, politik, dan ekonomi dapat kita masukkan dalam elemen lingkungan kebijakan/*policy environment*. Di lain pihak, barangkali timbul pertanyaan mengapa Edwards III tidak memasukkan elemen lingkungan kebijakan dalam teorinya? Menurut penulis, Edwards III tidak memasukkan elemen lingkungan kebijakan karena beliau memfokuskan teorinya pada aktor-aktor kebijakan yang mengimplementasikan kebijakan itu sendiri (implementor kebijakan) sehingga tidak memfokuskan pembahasan pada apa yang terdapat di luar implementor kebijakan. Di lain pihak, penelitian dalam tesis ini (yang membahas E-Pembelajaran dalam lingkup internal sekolah) juga tidak melibatkan elemenlingkungan kebijakan, sehingga model Edwards III masih relevan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Namun demikian ada satu hal yang terlihat menonjol pada gambar model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu model ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan akan menuju

“kinerja”. Kebanyakan ahli yang mengemukakan model proses kebijakan (Easton, Anderson, Patton & Savicky, dan Dunn) tidak memasukkan “kinerja kebijakan” dalam model proses kebijakan (Nugroho, 2008).

e. Model Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Disebutkan oleh Subarsono (2005).

Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Model Grindle ini dijelaskan oleh Suwitri (2008).

Variabel Konten selanjutnya diperinci lagi ke dalam 6 unsur, yaitu:

1) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*interest affected*)

Theodore Lowi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap

macam kegiatan politik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut.

2) Jenis manfaat yang dapat diperoleh (*type of benefits*)

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak.

3) Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (*extent of change envisioned*)

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (*target groups*) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya.

4) Kedudukan pengambil keputusan (*site of decision making*)

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.

5) Pelaksana-pelaksana program (*program implementors*)

Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.

6) Sumber-sumber yang dapat disediakan (*resources committed*)

Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.

Di samping Konten variabel, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel Konteks. Variabel ini meliputi 3 unsur, yaitu : Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors involved*). Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output. Melihat penjelasan mengenai model Grindle ini, kita dapat mencermati bahwa model Grindle ini memiliki aspek yang hampir mirip dengan model Van Meter dan Van Horn. Aspek yang sama adalah bahwa baik model Van Meter dan Van Horn maupun model Grindle sama-sama memasukkan elemen lingkungan kebijakan sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengikutsertakan 'kondisi sosial, politik, dan ekonomi' sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dan Grindle mengikutsertakan variabel besar 'konteks kebijakan' atau 'lingkungan kebijakan'.

Kelebihan dari model Grindle dalam variabel lingkungan kebijakan adalah model ini lebih menitikberatkan pada politik dari para pelaku kebijakan. Unsur pertama dari variabel lingkungan yaitu *power, interest and strategies of actors involved* menjelaskan bahwa isi kebijakan sangat dipengaruhi oleh peta perpolitikan dari para pelaku kebijakan. Aktor-aktor penentu kebijakan akan

berusaha menempatkan kepentingan mereka pada kebijakan-kebijakan yang melibatkan minat mereka, sehingga kepentingan mereka terakomodasi di dalam kebijakan. Unsur kedua dari Grindle yaitu *institution and regime characteristics* memiliki maupun unsur ketiga yaitu *compliance and responsiveness* memiliki kesamaan dengan faktor disposisi dari model Edwards III.

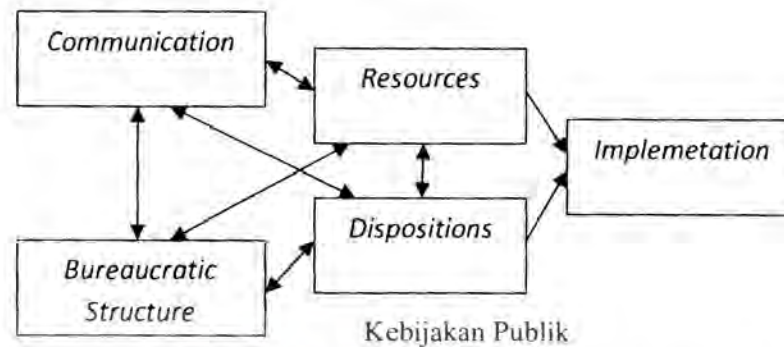
f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan/Implementasi Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model penerapan /implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Model implementasi ini meninjau tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan publik. Diantara beberapa model implementasi kebijakan disumbangkan dari pemikiran George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*/Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of The Policy Implementation*/Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*/ Merille S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administration Process*. Masing-masing model tersebut diuraikan sebagaimana berikut :

1) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam teori Edward III, implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public, yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions*) dan struktur

birokrasi (*bureaucratic structure*). Hubungan antara masing-masing faktor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.8. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi
Sumber: Edward III (1980: 148)

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan analisis implementasi kebijakan dalam hal ini adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Berikut uraian lebih jelas mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan publik menurut Edward III.

a) *Faktor Komunikasi*

Komunikasi menurut Subarsono (2010), adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan hal yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”. Implementasi yang efektif baru akan

terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- (1). Transmisi;penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi).
- (2). Kejelasan;komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).
- (3). Konsistensi;perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai.

b) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah:

- (1). Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan.
- (2). Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.
- (3). Wewenang; dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingan kelompoknya.
- (4). Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung

oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

c) Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III antara lain:

- (1). Pengangkatan birokrat; pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan.
- (2). Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana

kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

d) *Faktor Struktur Birokrasi*

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidak-efisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

- (1). *Standard Operating Procedures* (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (2). Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

Terdapat beberapa macam model implementasi kebijakan menurut para ahli sebagai berikut :

2) **Implementasi kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn.**

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementasi* (1975). Proses

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permormansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara *linier* dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar mengenai proses implementasi kebijakan. Model ini memiliki 6 variabel yang membentuk ikatan *linkage* (antara kebijakan dan pencapaian). Keenam variabel tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian tujuan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan ini merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

b) *Sumber-sumber kebijakan;*

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber-sumber

tersebut mencakup dana dan insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Selain itu, juga diperlukan waktu. Waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu merupakan bagian pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

c) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja. Jelas yang memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana standars dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum. Standar dan tujuan tidak langsung berdampak pada disposisi pelaksana melalui kegiatan komunikasi inter-organisasi. Dengan demikian, sangat penting untuk member perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketetapan komunikasi dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

d) Karakteristik badan-badan pelaksana;

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Kualitas dari suatu

kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor. Kualitas tersebut dapat ditinjau dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. Komponen dari model ini terdiri dari struktur-struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975: 203) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasi kebijakan, sebagaimana berikut.

- (1). Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- (2). Tingkat pengawasan secara hirarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
- (3). Sumber-sumber politik suatu organisasi
- (4). Vitalitas suatu organisasi
- (5). Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
- (6). Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

e) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Lingkungan

eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

f) Kecenderungan pelaksana

Kecenderungan atau karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Pengalaman-pengalaman subjektif individu memegang peranan yang sangat besar. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

3) Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmania dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmania dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis* (1983: 194). Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:
 - (1). Kesukaran-Kesukaran Teknis,
 - (2). Keberagaman Perilaku yang Diatur,
 - (3). Persentase Totalitas Penduduk yang Tercangkup dalam Kelompok Sasaran, dan
 - (4). Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki.
- b) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara, yaitu:

- (1). Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai,
- (2). Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan,
- (3). Ketetapan alokasi sumber dana,

- (4). Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana,
- (5). Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana,
- (6). Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang, dan
- (7). Akses formal pihak-pihak luar.

c) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

- (1). Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi,
- (2). Dukungan publik,
- (3). Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, dan
- (4). Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

4) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in The Third World* (1980), mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung pada content (isi) dan contextnya, dan tingkat keberhasilannya tergantung pada kondisi 3 komponen variabel sumberdaya implementasi yang diperlukan. Ketiga komponen ini menyebabkan program nasional menghasilkan variasi *outputs* dan *outcomes* yang berbeda di daerah. Ketiga komponen itu adalah:

a) *Contents of policy messages*

- (1). ketersediaan dana dan sumber lain untuk melaksanakan kebijakan;
- (2). adanya sanksi;

(3). tingkat kesukaran masalah kebijakan.

b) Kredibilitas pesan kebijakan

(1). kejelasan pesan kebijakan;

(2). konsistensi kebijakan;

(3). frekuensi pengulangan kebijakan;

(4). penerimaan pesan

c) Bentuk kebijakan

(1). *efficacy of the policy*;

(2). partisipasi masyarakat;

(3). tipe kebijakan.

Selain itu Grindle juga mengatakan bahwa implementasi program ditentukan oleh Konten (isi) program/*policy* dan konteks implementasinya, sebagai berikut.

a) *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

b) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya jenis kebijakan Redistribution menurut katagori Ripley dan

Lowie), maka implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

(1). Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

(2). Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya, kebijakan anti Korupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa presiden RI dengan berbagai badan pemeriksa, tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dijalankan dengan konsisten.

c) Kedudukan pengambil keputusan.

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

d) Pelaksana program.

Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

5) Implementasi Kebijakan Model Eugene Bardach

Bardach (1977) menulis hasil analisisnya dari berbagai kasus yang ia teliti tentang implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *The Implementation Game: What happen after a bill become a Law?*. Bardach (1977) menyatakan bahwa proses politik dalam suatu kebijakan tidak berhenti hanya pada saat penyusunannya, tapi juga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut. Berbagai trik politik berlangsung saat sebuah kebijakan dijalankan, sehingga seringkali tujuan utama dari kebijakan tersebut justru tidak tercapai.

Menurut Bardach (1977), sebuah implementasi adalah suatu permainan tawar-menawar, persuasi, dan manuver di dalam kondisi ketidak-pastian oleh orang-orang dan kelompok-kelompok guna memaksimalkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Hal ini terjadi karena kontrol rasional organisasi tidak dapat berjalan dengans sendirinya pada policy yang dijalankan oleh berbagai aktor dan institusi, atau dengan kata lain, proses implementasi itu sudah dengan sendirinya berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan kekuasaan di antara para aktor pelaksanaannya. Permainan yang demikian tentu bisa berakibat tidak sehat bagi implementasi sebuah kebijakan, karena dapat mengakibatkan:

- a) Terpecahnya sumberdaya
- b) Kaburnya tujuan
- c) Dilema dan kesulitan-kesulitan administrasi
- d) Terkurasnya energi

Untuk mengatasi atau meminimalisir dampak buruk permainan politik tersebut yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya

menjadi tujuan utama dari sebuah kebijakan, maka pembuat kebijakan harus memberikan perhatian ekstra pada 2 hal, yaitu:

a) Penulisan skenario implementasi (*scenario writing*), artinya pembuat kebijakan harus memperkirakan bagaimana scenario proses implementasinya berikut syarat-syarat yang dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (tujuan dan sasaran yang jelas, komunikasi, siapa pelaksananya, koordinasi antar pelaksana, sumberdaya yang cukup, dll. lihat acuan Gunn). Dengan penulisan scenario implementasi ini kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul dalam proses implementasi akan lebih mudah diantisipasi

b) *Fixing the Game*, artinya politisi (*the top*) yang berkepentingan dengan pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan, harus mengikuti keseluruhan jalannya implementasi dan segera memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diantara para implementor (jika perlu dengan tawar-menawar, persuasi, manuver, dan lain-lain).

Lebih lanjut, pada bukunya *Getting Agencies to work Together (1998)*, Bardach mengakui peran penting para pelaksana tingkat bawah (*the street level*) dalam suatu implementasi kebijakan, dan menekankan pentingnya pendekatan informal dengan mereka, bahkan berkolaborasi jika perlu, demi tercapainya tujuan kebijakan.

6) Implementasi Kebijakan Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn adalah penulis dari Inggris yang sangat kuat mempertahankan pendapatnya tentang pentingnya pendekatan *Top-*

down dalam proses implementasi, meski banyak kritik atas pendekatan tersebut. Bagi mereka pendekatan bottom-up yang cenderung mendekati permasalahan implementasi kasus per kasus dianggap tidak menarik apalagi mengingat para pembuat kebijakan adalah orang-orang yang telah dipilih secara demokratis, sehingga sudut pandang mereka tentang implementasi bukanlah suatu hal yang mencederai demokrasi. Ide dasar mereka bermuasal dari publikasi Gunn pada tahun 1978 yang mengkaji tentang penyebab implementasi seringkali mengalami kegagalan, dan kemudian dikembangkan dalam tulisan yang berjudul *Policy Analysis for The Real World* (1984).

Dalam buku tersebut mereka memberikan proposisi-proposisi untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi para pembuat kebijakan, sebagai berikut.

- a) Situasi di luar badan/organisasi pelaksana tidak menimbulkan kendala-kendala besar bagi proses implementasi (*that circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints*)
- b) Tersedia cukup waktu dan cukup sumberdaya untuk melaksanakan program (*that adequate time and sufficient resources are made available to the programme*)
- c) Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumberdaya yang dibutuhkan, termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi (*that not only are there no constraints in terms of overall resources but also that, each stages in the implementation process, the required combination of resources is actually available*).

- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid. *(That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect).*
- e) Hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada hubungan antara (intervening variable) *(the relationship between cause and effect is direct and that there are a few, if any, intervening links).*
- f) Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga lainnya, namun jikapun melibatkan lembaga lainnya, hendaknya hubungan kebergantungan antar lembaga tersebut sangat minim *(that there is a single implementing agency that need not depend upon other agencies for success, or if other agencies must be involved, that the dependency relationships are minimal in number and importance).*
- g) Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi *(that there is complete understanding of, and agreement upon, the objectives to be achieved, and that these conditions persists throughout the implementation process).*
- h) Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, adalah mungkin untuk menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat, dalam urutan langkah –langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna *(in the moving toward agreed objectives it is possible to specify, in complete detail and perfect sequence, the tasks to be performed by each participant) .*

- i) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat dalam program (*that there is perfect communication among, and co-ordination of, the various elements involved in the programme*),
- j) Bahwa yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan yang sempurna (*That those in authority can demand and obtain perfect obedience*).

Menurut Hogwood dan Gunn untuk mencapai implementasi yang sempurna adalah mungkin manakala dapat mengontrol seluruh system administrasi sehingga kondisi-kondisi sebagaimana yang mereka sebutkan di atas dapat terpenuhi, meski juga menyadari bahwa kondisi demikian nyaris mustahil terjadi di dunia nyata. Namun mereka memandang bahwa proposisi-proposisi tersebut adalah syarat normatif yang harus diupayakan agar implementasi berjalan menuju sempurna. Sayangnya di dunia nyata selain kondisi demikian sangat sulit bahkan mustahil dipenuhi sepenuhnya, juga bahkan karena memang tak harus seperti itu.

Bagi Negara-negara maju dengan prinsip demokrasinya mengharapkan syarat ke 10 terpenuhi yang menuntut dan menerima kepatuhan yang sempurna dari aparat pelaksana, nyaris tak mungkin. Bagi Negara-negara berkembang, syarat-syarat yang sulit dipenuhi lebih banyak lagi terutama yang berkaitan dengan ketersediaan waktu dan sumberdaya secara menyeluruh (SDM, dana, skills, teknologi, dan lain-lain) bagi setiap program yang diimplementasikan. Justru karena keterbatasan sumberdaya (dan juga waktu) maka banyak kebijakan-kebijakan (program-program) yang harus dilaksanakan secara incremental. Selain itu, syarat ke 8 yang menuntut spesifikasi tugas yang detail, lengkap dalam urutan-urutan yang sempurna; seringkali justru tidak harus sedemikian ketat, karena cenderung menyebabkan implementor lebih memilih memenuhi SOP dari

pada bertindak memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan sudut pandang yang sangat top-down oriented tersebut, tidak tersisa peluang diskresi bagi implementor yang mungkin justru sangat diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai dalam situasi dan kondisi yang beragam di lapangan.

Namun, guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menyajikan salah satu teori yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model *Direct and Indirect Impact on Implementation* (1980). Hal ini bukan berarti ada justifikasi terhadap teori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan agar penelitian lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini.

2. Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial

Pengertian hibah dan bantuan Sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 32

Tahun 2011, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah memenuhi paling sedikit 3 kriteria yaitu :

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi: a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Selektif
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan

Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:

- 1) Memiliki identitas yang jelas
- 2) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
- 4) Sesuai tujuan penggunaan.

Arti sosial dalam pembahasan ini ada 2 macam, yaitu : sosial secara umum dan sosial organisasi.

- 1) Sosial secara umum dapat diartikan suatu kegiatan yang memiliki nilai-
- 2) nilai banyak kemurniannya. Sebagai contoh : Suatu organisasi sosial atau non- organisasi (sosial pribadi) bekerja lebih menekankan pada kegiatan sosial tanpa pamrih yang benar-benar tulus keluar dari hati nurani yang paling dalam. Kegiatan tersebut dapat berupa penanggulangan bencana alam, kecelakaan sesaat, anak terlantar atau anak jalanan dan fakir miskin. Mereka memberikan bantuan tersebut tidak ada tendensi apapun untuk menjadikan agar nama mereka terkenal.
- 3) Sosial organisasi disini diartikan melakukan suatu kegiatan sosial dengan menampung bantuan yang diorganisir oleh pihak tertentu dan terkadang dipolitisir untuk mencari sensasi misalnya menjadikan orang tersebut terkenal atau dijadikan idola dan cenderung bermuatan politik. Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini mekanisme tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi sehingga upaya pemberian bantuan tidak terjadi overloopping atau ada data-data yang tidak terdeteksi.

Dalam penyampaian bantuan tersebut kita harus mendata semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian data yang diperoleh

merupakan data yang akurat sehingga dapat dijadikan untuk membuat database. Dengan database tersebut kita dapat membuat semacam kartu pintar (smart card) yang memiliki fasilitas untuk memperoleh bantuan secara benar dan tidak dapat disalahgunakan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya. Sistem kartu tersebut menggunakan sistem autentikasi yang tidak dapat digunakan oleh orang lain. Sehingga bantuan akan bisa diprogram dari pusat data sesuai dengan dana yang dimiliki badan sosial tersebut dan kebutuhan masyarakat yang akan dibantu. Sebagai contoh jika data yang terhimpun cukup besar maka sistem dapat diprogram sesuai dengan persediaan, sedangkan apabila dana terbatas sistem dapat diprogram seminimal mungkin sehingga dapat diperlakukan dengan adil dan merata. Dari sisi si pemberi dana, agar orang yang mampu bersedia memberikan bantuan kepada badan sosial tersebut, pemerintah turut berperan dalam hal ini misalnya bagi pengusaha yang menyisihkan pendapatannya kepada badan sosial maka dia akan diberi potongan pembayaran pajak berapa % dari pendapatannya dan mendapatkan kemudahan birokrasi dalam mengurus sesuatu. Agar itu dapat berjalan kita perlu juga mendata pengusaha-pengusaha yang ada atau orang yang dianggap mampu untuk memberikan bantuan, kemudian dibuatkan databasenya dan diberikan kartu sebagai donator dari badan sosial tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hibah” berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Kata “hibah” memiliki 2 (dua) makna, yaitu hibah antar personal sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hibah

terkait dengan keuangan daerah, sesuai dengan objek tulisan hukum ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1666 KUHP Perdata, menyatakan hibah/penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan/perjanjian (*overeenkomst*) dengan/dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (*om niet*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan/melepaskan sesuatu benda kepada/demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan/penghibahan itu.
- 2) Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf f PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- 3) Pasal 42 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- 4) Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 5) Buletin Teknis Nomor 4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, menyatakan bahwa hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- 6) Buletin Teknis Nomor 13 SAP tentang Akuntansi Hibah, yang menyatakan bahwa belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, sertatidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

a. Tujuan Pemberian Hibah

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Asas-asas yang terdapat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (3) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif;
- 2) Asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- 3) Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat;
- 5) Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Bentuk Hibah

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PPKD merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).
- 2) Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian

obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).

c. Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hibah Berbentuk Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemberian hibah sejak tahun anggaran 2012 menjadi semakin selektif dan ketat. Kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah disyaratkan oleh Permendagri dan dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemberian hibah mulai dari proses pengajuan proposal atau permohonan hibah, penganggaran oleh pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah tersebut. Ditekankan pada Pasal 42 Permendagri tersebut, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial harus diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Pemerintah daerah baru dapat menganggarkan belanja hibah setelah peraturan kepala daerah dimaksud ditetapkan dan berlaku dengan menyesuaikan kepada ketentuan Permendagri tersebut. Berarti selain kriteria minimal yang dipersyaratkan oleh Permendagri, pemerintah daerah dapat menambahkan kriteria/persyaratan lain terkait hibah yang dinilai penting dan sesuai dengan karakteristik daerahnya selama tidak bertentangan dengan Permendagri. Berikut penjelasan kriteria/persyaratan terkait pemberian hibah:

d. Kriteria atau Syarat Minimal Pemberian Hibah

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKAPPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. Anggaran belanja hibah, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak dapat lagi dicantumkan secara gelondongan atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan penggunaan hibah juga secara spesifik dicantumkan dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 10 dan Pasal 1
- 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Kriteria ini

berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundangundangan, misalnya hibah untuk organisasi semi pemerintah seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, maupun organisasi semi pemerintah lainnya.

- 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah; Penerima hibah dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Pemerintah, yaitu satuan kerja dari kementerian kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, atau sering disebut sebagai hibah kepada instansi vertikal;
 - b) Pemerintah daerah lainnya, yaitu hibah kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Perusahaan daerah, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Masyarakat, yaitu kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada masyarakat ini diberikan dengan persyaratan minimal memiliki kepengurusan yang jelas dan

berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan

- e) Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan ini diberikan dengan persyaratan minimal telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan), berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap.

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu menyangkut penyaluran dana hibah dan bantuan sudah banyak dilakukan. Evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program dilakukan di berbagai bidang, pada intinya adalah bagaimana pemerintah mengimplementasikan dana bantuan. Musawa (2009), melakukan penelitian mengenai “ Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin, hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah, mendeskripsikan distribusi Program Raskin di Kelurahan Gajahmungkur Kota Semarang, memetakan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Raskin dan menyarankan upaya pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang

berlaku ditempat tertentu di masyarakat. Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan mengambil sampel RW II, III dan RW IV Kelurahan Gajahmungkur Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing- masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga, yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Selain itu perlu mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kecil yang perlu terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

Prastama, Suryono, Wachid (2010). Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah pada Kelurahan Ciptomulyo kota Malang, berdasarkan

pada Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010. Bagaimana implementasinya pengelolaan dan penggunaan dana hibah di lapangan yang di indikatorkan dalam efektifitas, efisiensi, transparansi, dan juga apakah tujuan dana hibah dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tercapai, serta faktor-faktor pendukung apa yang mendorong implementasi dana hibah. Hasil daripada penelitian ini dapat dikatakan bahwa di dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang tercantum sudah sesuai dengan apa yang terkandung di dalam peraturan walikota Malang no.10 tahun 2010, yang di tandai dengan efisiensi, efektifitas, dan Transparansi. Di dalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah terlaksana secara utuh akan tetapi masih saja ada yang kurang di dalam pemberdayaan masyarakat, di dalam hal ini pemberdayaan masyarakat masih kurang di dalam bidang pelatihan, dan juga bidang pengembangan home industry yang ada di daerah, kemudian jika bicara di dalam partisipasi setiap elemen masyarakat sudah bergerak dan mau untuk ikut berpartisipasi di dalam program dana hibah ini. Mulai dari mereka menyumbang pikiran pada proses perencanaan, dana atau material sampai pada sumbangan berupa tenaga pada proses pelaksanaan dan pengawasan.

Sitanggang, Tangdililing, Maryuni (2014), telah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,

kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Sedangkan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbulah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sosialisasi program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan kurang optimal, sehingga masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah, serta masih adanya nepotisme dalam pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan tetapi dalam proses pelaksanaan masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbulah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya ditemukan beberapa masalah, antara lain : Munculnya proposal yang tidak diverifikasi oleh lembaga terkait, sosialisasi program kurang optimal, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan prima bantuan ada yang tidak dapat dicairkan dengan berbagai alasan. Kemudian penerapan implementasi

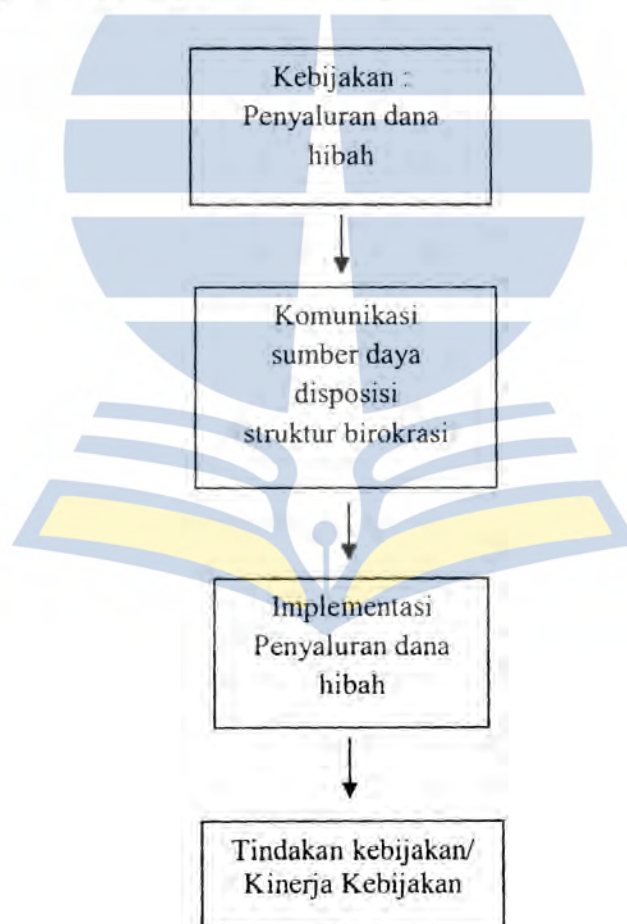
kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang optimalnya sumber daya manusia yang telah ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Prasetyo (2014), telah melakukan penelitian mengenai “Implementasi Program Bantuan Hibah bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelulor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Efektivitas program bantuan hibah bagi lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Gresik, Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng ditinjau dari : Bentuk hibah sudah cukup efektif. Penerima hibah yang selama ini telah mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan hibah sudah sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Persyaratan pengajuan hibah yang dilakukan oleh para pemohon banyak yang kurang memenuhi syarat. Penggunaan bantuan hibah yang telah diterima oleh lembaga kemasyarakatan sudah cukup efektif, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola dalam pemanfaatan bantuan hibah . Kerjasama antara pemerintah dengan penerima dana hibah menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan dana hibah dengan baik.

Sedangkan kendala yang kami hadapi untuk dapat memaksimalkan hasil program bantuan hibah adalah adanya keterbatasan sumber dana. Selain itu masih terdapatnya para stakeholders dan penerima bantuan hibah yang komitmen pada peraturan atau ketentuan perundangan sehingga masih ditemukan penyelewengan-penyelewengan bantuan hibah sehingga bantuan hibah menjadi kurang tepat sasaran.

C. Kerangka Berfikir

Atas dasar beragam teori-teori yang dikemukakan di landasan teori, maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.9. Kerangka Berpikir Penelitian

BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sejalan dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007: 6).

Peneliti berharap dapat menemukan berbagai informasi yang mendukung proses implementasi kebijakan. Selain itu alasan yang mendorong peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Implementasi kebijakan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung.

B. Sumber Data dan Pemilihan Informan

Sumber data dari penelitian ini yaitu Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung dan seluruh wilayah Kecamatan di Kabuapten Tana Tidung dan sumber data tertulis berupa referensi yang digunakan oleh peneliti dalam bentuk buku, jurnal, catatan lapangan, serta foto. Sumber data digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya dianalisis secara induktif.

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara alamiah pada sumber data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian deskriptif sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam (Indepth interview) dengan mengacu pada pedoman wawancara sebagai penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka kepada informan yang ditentukan. Informan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat suatu gejala, fenomena dan situasi.

2. Observasi

Peneliti melaksanakan pengamatan dengan menggunakan pedoman observasi untuk memperoleh data yang diinginkan dan setiap informasi yang ditemukan kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Observasi (pengamatan) dimaksudkan untuk memperoleh informasi serta gambaran empiric tentang data-data yang diperlukan itu. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas ataupun kondisi perilaku.

3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik di atas yaitu wawancara dan observasi, dilakukan pula teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder diperoleh melalui cara mengumpulkan berbagai dokumentasi tertulis (peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan ketentuan lainnya) sebagai bahan referensi dan komparasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penulis dalam

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan alat pengumpulan data menggunakan wawancara. Panduan wawancara, digunakan sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsisten.

4. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moloeng, 2000). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung dan seluruh wilayah Kecamatan di Kabuapten Tana Tidung yang pernah menerima hibah bansos. Lokasi dipilih berdasarkan pengamatan bahwa di tiap-tiap desa mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam pengelolaan distribusi penyaluran dana hibah dan bansos yang berdasarkan hasil musyawarah warga. Penelitian akan dilaksanakan selama dua bulan

D. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2013: 222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Sejalan dengan pikiran Sugiyono, Nasution (Sugiyono, 2013: 223) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif menjadikan manusia sebagai

instrumen peneliti utama. Karena, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi dan tabel dokumentasi yang sewaktu-waktu dapat berubah di lapangan.

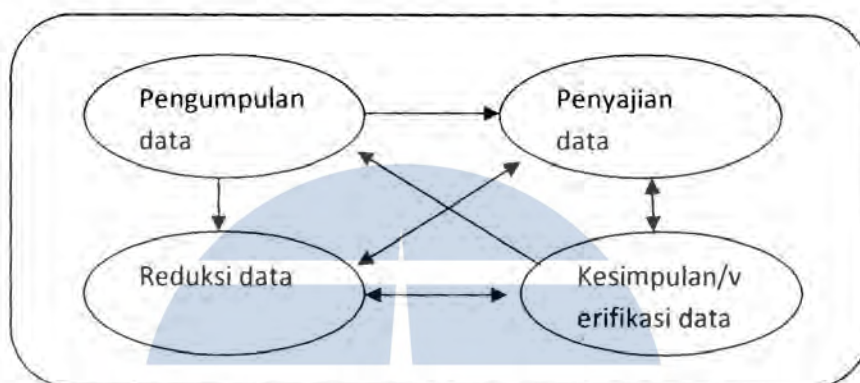
E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan multi sumber bukti (*triangulasi*) artinya teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti akan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2006).

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis

kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

G. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian secara jelas akan mempermudah penulis membuat keputusan yang tepat, data mana yang tidak perlu dijamah ataupun data mana yang perlu dibuang atau dikeluarkan.

Menurut Moloeng (2009:94) bahwa penentuan fokus penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, membatasi studi agar fokus tidak melebar dan jamak. Kedua, penetapan focus dapat lebih dekat dihubungkan oleh intraksi antara peneliti dan fokus.

Dengan dasar pemahaman tersebut, maka fokus penelitian di dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- I. Proses implementasi kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan.
 - a. Struktur dan Tugas Organisasi Pelaksana

- b. Kualitas Sumber Daya Pelaksana
 - c. Sumber Pendanaan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.
- a. Faktor penghambat
 - 1) Komunikasi
 - 2) Sistem Birokrasi
 - b. Faktor pendukung
 - 1) Disposisi/ Sikap Prilaku Imlementor
 - 2) Sumber Daya
 - 3) Sarana Prasarana



BAB. IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung

a. Visi Dan Misi Kabupaten Tana Tidung

1) Visi Kabupaten Tana Tidung

Meningkatkan pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui harmonisasi dalam pendayagunaan potensi sumberdaya manusia, sumber daya alam, ekonomi prorakyat, budaya local dan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

2) Misi Kabupaten Tana Tidung

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pengetahuan Kabupaten Tana Tidung tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a) Meningkatkan sumberdaya berkualitas dan berdayasaing;
- b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan;
- c) Mengembangkan prekonomian daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat;
- d) Menjadikan budaya local sebagai pondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya local;
- e) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis IPTEK;
- f) Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas;

- g) Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara;
- h) Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan; dan
- i) Mengembangkan agroindustri pertanian.

3) Geografis dan Administratif Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung adalah Kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 juli 2007. Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau daerah otonom ke -14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 desember 2007. Kabupaten ini memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km², atau hanya 35,63 dari wilayah kabupaten induknya. Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, secara astronomi terletak diantara 116° 42' 50" - 117° 49' 50" Bujur Timur dan 3°12' 02" - 3° 46' 41" Lintang Utara. Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 Kecamatan dan 23 desa/kelurahan. Yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Melalui Peta Padu Serasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Nunukan, sebelah Timur Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan Dan Kota Tarakan, sebelah Selatan Kabupaten Bulungan, sebelah barat kabupaten.



Gambar 4.1 Kantor Bupati Tana Tidung

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di stasiun meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2008, mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 3.146,7 mm atau 256 hari hujan (hh). Dengan penyinaran matahari rata-rata 46 %. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2008 adalah 26,9 ° c yang berkisar antara 21,8 ° c- 35, 4 °c. Sedangkan curah hujan sepanjang tahun 2008 berkisar antara 151 mm sampai 376,9 mm. Dengan kelembaban udara tercatat relative tinggi berkisar antara 83 % sampai 87 % dengan rata-rata selama tahun 2008 adalah 85 %. Secara geografis Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah perhuluhan sungai-sungai besar yang mengalir di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Terdapat 3 daerah aliran sungai utama, yaitu DAS Kayan, DAS Bandan Dan DAS Sesayap dengan panjang sungai yang bervariasi. Pada DAS Kayan memiliki panjang 576 km termasuk yang berada di wilayah . Pada DAS Bandan memiliki panjang sungai 70 km sedangkan pada sungai sesayap memiliki panjang sungai 278 km. Sebagian daerah hulu maka Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah yang harus di konservasi, mengingat fungsi sebagai penjaga keseimbangan

ekosistem alam bagi daerah bawahan (*hilir*). Dari segi akses, Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki akses langsung dengan dunia luar kecuali melalui sungai dan jalan yang sangat terbatas (*land- lock*).

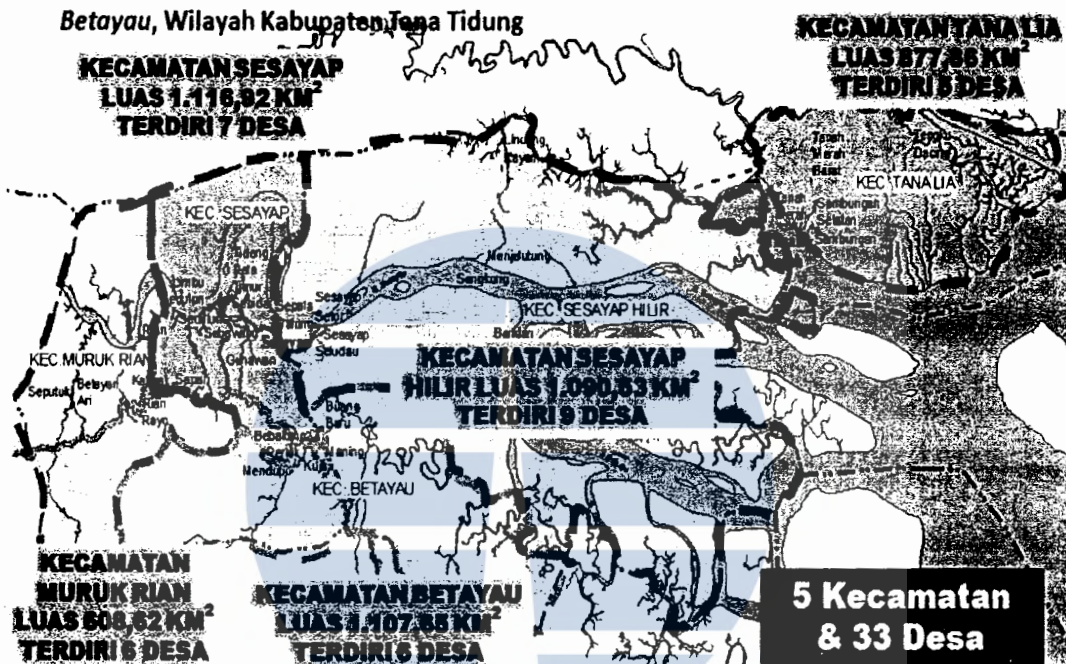
Berdasarkan topografinya Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl diatas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian \pm 500 - 2000 m di atas permukaan laut. Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian kecil di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir Maupun Tana Lia. Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri puluhan sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, dengan tebing yang terjal dan kemiringan yang tajam. Terdapat 2 buah gunung di Kecamatan Sesayap, yaitu Gunung Rian dan Gunung Aung.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi oleh *ultisol*, *inceptisol*, *entisol* dan *spodosol*. *Ultisol* adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. *Inceptisol* adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, *entisol* adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsor tanah lainnya. *Spodosol* adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah.



PETA ADMINISTRASI PEMEKARAN KABUPATEN TANA TIDUNG

- ✓ Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung
- ✓ Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau, Wilayah Kabupaten Tana Tidung



Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten dan Cakupan Wilayah Kajian

Tabel 4.1 Nama dan Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

Kecamatan		Banyaknya desa	Luas wilayah	
			Km ²	%
01		02	03	04
1	Sesayap	12	1.752,54	36,30
2	Sesayap Hilir	08	877,86	18,18
3	Tana Lia	03	2.198,18	45,52
Jumlah		23	4.828,58	100,00

Sumber: Tana Tidung Dalam Angka 2011, Badan Pusat Statistik

4) Demografi

Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi. Jumlah penduduk laki-laki kabupaten tana tidung pada tahun 2011 sebanyak 12.455 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10.594 jiwa.

Secara demografi penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 sebanyak 23.049 jiwa, penyebaran penduduk dari tiga Kecamatan tidak merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sesayap sebanyak 12.967 jiwa sedangkan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tana Lia sebanyak 3.848 jiwa. Dengan luas wilayah keseluruhan 4.828,58 km² kepadatan penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 sebesar 4,733 jiwa/km². Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk sebesar 1,578 jiwa/km² dari tahun 2010 sebesar 3,155 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kota sebesar 7,398 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tana Lia sebesar 1,750 jiwa/km². Komposisi menurut pendidikan akhir, terlihat bahwa sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan masih sangat kurang. Untuk pengembangan wilayah Kabupaten Tana Tidung diperlukan sebuah upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia melalui jenjang pendidikan minimal tamat smu dan dengan lebih memotivasi masyarakat untuk bersekolah.

Jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2010 paling banyak bekerja di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pemburuan

dan perikanan yaitu sebanyak 46,49 jiwa sedangkan jenis pekerjaan terendah di bidang lembaga keuangan, real estate dan usaha persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 1,02 jiwa. Masalah yang terkait dengan proses pembangunan di Kabupaten Tana Tidung adalah masalah mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan.

B. Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2007:144).

Lebih jauh dijelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita.

Dunia konsep yang tercemin dalam kondisi ideal, sesuatu yang diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan (Purwanto, 2012:65). Tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan publik. Menurut Jones (dalam Nashir Budiman 1996:300) implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kegiatan untuk mengoperasikan dimaksudkan berisikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan pengusulan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, juga sudah mulai menerapkan tahapan-tahapan yang seharusnya, hal ini seperti disampaikan Uus Rusmanda, selaku kabag Kesejahteraan Rakyat di bagian sosial Kabupaten Tana Tidung (wawancara tanggal 25 april 2016):

“penyusunan dan anggaran untuk hibah dan bantuan sosial di sini dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dimana penyusunannya melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah”.

Tahapan-tahapan penganggaran hibah dan bantuan sosial meliputi usulan secara tertulis calon penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dengan syarat organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada Pemda setempat sekurang-kurangnya 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap). Selanjutnya proposal tersebut dievaluasi oleh instansi yang terkait sesuai dengan bidang-bidang yang tertera dalam proposal tersebut melalui pertimbangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses selanjutnya instansi tersebut memberikan kepada Kepala Daerah Bagian Verifikator Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan dana/anggaran untuk dicairkan sesuai dengan rencana APBD ke rekening-rekening yang mengajukan proposal. Tetapi dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh H. Usnan Kabag Keuangan.

“ disini proses penentuan anggaran bantuan dan hibah belum jelas, sehingga kami sendiri juga kadang bingung. Apalagi proses penganggaran dan penentuan penerimanya, seharusnya kan semua dilibatkan jadi jelas posedurnya”.

Dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan Hibah dan Bansos masih dalam kondisi yang tidak jelas. Pertama, penganggaran Hibah dan Bansos yang seharusnya sudah pasti nama penerima dan besarnya, namun tidak sedikit penentuan peruntukan Hibah dan Bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kedua, sebagian dana Hibah dan Bansos dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek (belum ditetapkan siapa penerimanya). Seiring waktu pelaksanaan APBD, baru akan ditentukan peruntukkan dan siapa penerimanya.

Proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena masalah sesuai pengamatan peneliti mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan “TM”, berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 April 2016 :

“Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2014 di KTT, menurut saya sedikit bermasalah, karena kami masyarakat awam ini tidak mengetahui informasi program tersebut dengan jelas, kami juga tidak tahu kalau ada bantuan dari pemerintah, jangankan menerima tahu kegiatannya dan cara mengajukannya saja tidak, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dapat bantuan”.

Dari evaluasi yang diperoleh peneliti, memang ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung maupun masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung kurang optimal, sehingga hanya orang-orang tertentu dan lembaga tertentu saja yang mengetahui program ini.
- b. Pelaksanaan program bantuan hibah dan bansos masih menggunakan data penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tahun sebelumnya
- c. Masih banyak penerima bantuan belum diverifikasi datanya secara akurat.
- d. masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan hibah dan bantuan sosial, bahkan bantuan tersebut terkesan mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme.

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang dinamis, sehingga terdapat berbagai macam faktor disekelilingnya yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu implementasi bantuan dana hibah dan bantuan sosial ini harus diluruskan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hermendes selaku bendahara Hibah bansos di Kabupaten Tana Tidung.

“Sebaiknya penyaluran dan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan sesuai prosedur yang ada. Prosedur kerja program hibah dan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang meliputi penentuan kuota, penyeleksian, penetapan, penyaluran, sehingga bisa adil”.

Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan dana Hibah dan Bansos, berbagai pengaturan pengelolaan Hibah dan Bansos telah mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005) mengatur secara umum ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkait Hibah dan Bansos. Pada tanggal 27 Juli 2011, Mendagri berdasarkan kewenangannya dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah, menetapkan Permendagri 32/2011. Kemudian tanggal 21 Mei 2012 Mendagri kembali menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 39/2012). Permendagri 32/2011 mengatur:

- a. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan; pertanggungjawaban dan pelaporan; serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bansos harus diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah; dan
- b. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pemberian Hibah dan Bansos sebelum berlakunya Permendagri 32/2011 harus menyesuaikan dengan Permendagri tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan KPK melalui fungsi koordinasi pemberantasan korupsi melakukan kerjasama dalam rangka mendorong pemerintah daerah mengelola secara sungguh-sungguh dana Hibah dan Bansos agar terhindar dari penyalahgunaan. Kemendagri melakukan pengkajian bersama dengan KPK yang

hasilnya, saat ini dana Hibah tidak bisa lagi asal diberikan tanpa tolok ukur, namun harus dengan kriteria yang jelas. Dana Hibah akan diperiksa oleh BPK dan kalau ada yang tidak sesuai, bisa diusut secara hukum. Selain itu, pada tanggal 6 Januari 2014 KPK mengeluarkan surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 yang dikirimkan kepada seluruh Kepala Daerah. Dalam surat tersebut KPK meminta kepada para Kepala Daerah agar pengelolaan dana Hibah dan Bansos mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah dengan Permendagri 39/2012.

Pemberian dana Hibah dan Bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan adanya Permendagri 32/2011 yang telah diubah dengan Permendagri 39/2012 diharapkan mampu memberikan pedoman secara komprehensif mengenai pengelolaan Hibah dan Bansos. Dalam tulisan hukum ini, Penulis mencoba membahas pengaturan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Untuk mengoptimalkan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, mulai tahun ini telah dilakukan sosialisasi program. Seperti yang disampaikan Jefri selaku Kasubbag Kesejahteraan Sosial.

“ sosialisasi pemanfaatan hibah dan bansos ini dinilai sangat penting bagi masyarakat selaku penerima bantuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dana hibah dan Bansos. Sosialisasi ini juga bertujuan guna meminimalisir beberapa permasalahan yang sering terjadi di antaranya, kurang pemahannya masyarakat mengenai dana hibah. Kemudian, pola pikir masyarakat bahwa dana hibah dan Bansos adalah hak yang tidak perlu laporan pertanggung jawaban. Belum optimalnya fungsi SKPD teknis dalam hal proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban hibah dan Bansos serta penggunaan yang tak sesuai dengan proposal”

Ditambahkan juga oleh Linda Safitri, selaku Kasubbag Pendidikan, kesehatan dan SDM di bagian Kesra Kabupaten Tana Tidung:

“kepada calon penerima hibah bahwa monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos tersebut akan dilakukan oleh BPK, jika hasilnya terdapat penggunaan dana hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan usulan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, jadi penerima hibah dan bansos harus betul-betul menggunakan dana itu untuk kegiatan yang diusulkan sesuai dengan proposal”.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat menjadi panduan proses verifikasi dan rekomendasi SKPD terhadap proposal yang ada di atas asas keadilan dan kepatutan rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Hal serupa disampaikan Sekda Kabupaten Tana Tidung. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme penyaluran dana bansos dan hibah serta kelengkapan dokumen permintaan untuk pencairan dana tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyalurannya.

”Agar masyarakat lebih tahu mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana hibah dan bansos agar nantinya tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.

Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan penggunaan dana hibah dan dana Bansos kepada penerima dana tersebut. Sasaran yang diharapkan adalah para peserta memahami dengan benar terkait persyaratan untuk menerima bansos serta pelaksanaannya di lapangan ke depannya. Ia juga menyampaikan bahwa pemberian bantuan dana hibah dan bansos ini merupakan salah satu langkah pemkab untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung visi misi bupati Tana Tidung. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mengetahui program bantuan dan hibah dan bansos. Tetapi fakta yang ada di lapangan, tidak semua

lapisan masyarakat mengetahui program ini, seperti hasil wawancara peneliti dengan Basri masyarakat di Kecamatan Muruk Rian.

“Wah mas...saya malah baru tau kalau ada program bantuan hibah dan bantuan sosial, setau saya hanya BLT jamannya pak SBY dulu..ada bantuan untuk usaha kecilkah, kalau ada kami mohon informasinya”.

Setelah melakukan sosialisasi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial ini adalah mekanisme pengajuan dana hibah dan bantuan sosial, karena ini sangat menarik bagi masyarakat. Hasil wawancara dengan warga di Tana Merah, Hamid berdasarkan wawancara tanggal 19 April 2016.

“Pak, kami sangat tertarik dengan program bantuan yang diberikan pemerintah. Saya ketua kelompok tani di UPT Sambungan. Sejak saya tinggal disini saya atau kelompok tani saya belum pernah menerima bantuan tersebut, mendengar ada bantuan si iya....tapi menerima belum pernah, karena kami tidak tau tata caranya”.

Organisasi kemasyarakatan, misalnya kelompok tani menyampaikan usulan atau proposal hibah secara tertulis kepada bupati. Selanjutnya Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan atau proposal, kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Proses implementasi kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan, diperlukan sebuah pengorganisasian berupa struktur dan tugas organisasi yang jelas, kualitas sumber daya organisasi dalam pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tana Tidung.

1. Struktur dan Tugas Organisasi Pelaksana

Fungsi yang diemban dalam struktur organisasi dan mekanisme kerjanya akan berperan dalam kualitas pelaksanaan kebijakan oleh organisasi. Kewajiban Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten dalam mengelola unit pelaksana penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dari tingkat kabupaten, adalah kepala daerah, yang dievaluasi oleh SKPD terkait dan TAPD. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tana Tidung memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Sedangkan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbulah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tana Tidung tahun 2014-2015.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan meliputi ormas kemasyarakatan yang mengajukan proposal, SKPD terkait, Bupati Tana Tidung melalui TAPD bagian kesejahteraan Rakyat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 maupun 2014

Kabupaten Tana Tidung ditemukan beberapa masalah, antara lain : Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sosialisasi program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan kurang optimal, karena instansi yang ditunjuk tidak menjalankan fungsinya, sehingga tugas dalam pelaksanaan bantuan hibah masih adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas pelaksanaan bantuan hibah dan Bansos, sehingga masing-masing instansi terkait saling menyalahkan peran dan wewenang mereka. Sehingga para penerima dana hibah dan bantuan sosial merasa birokrasinya sulit dan terlalu berbelit-belit sehingga mudah terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam proses pengajuan dana hibah dan bantuan sosial.

2. Kualitas Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelasnya aturan yang berlaku, jika para personelnnya yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan dapat dan berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin yang dapat dipahami

sebagai suatu proses suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*)

Keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting. SDM merupakan faktor aktif yang bertugas mengolah dan memperdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan sarana yang memadai tidak akan membuat implementasi kebijakan berhasil jika tidak didukung sumber daya manusia yang profesional. Faktor-faktor yang disampaikan oleh para ahli dalam teori digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan implementasi kebijakan program hibah / bantuan kepada organisasi kemasyarakatan kurang berhasil atau kurang tepat sasaran.

Kualitas sumber daya manusia akan merujuk kepada kemampuan para aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, baik dalam melakukan seleksi bagi proposal yang memberhak mendapatkan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sehingga penyaluran tersebut tepat sasaran dan organisasi tersebut benar-benar membutuhkan biaya dan menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang peneliti lakukan dalam proses penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, masih kurang optimalnya pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan hal ini dikarenakan masih-masing lembaga yang menangani penyeleksian adalah dinas-dinas yang terkait dengan bidang-bidang sesuai pengajuan proposal belum terlaksana dengan baik, sehingga dalam proses pencairan dana dari pemerintah daerah mudah dilaksanakan. Dapat

penulis simpulkan bahwa, keberhasilan program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, tergantung dari kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan profesionalisme yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan ini, dari segi kuantitas sudah mencukupi baik dari SKPD terkait maupun dari bagian Kesejahteraan Rakyat dan bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Tana Tidung .

3. Sumber Pendanaan

Implementasi kebijakan, selain membutuhkan organisasi pelaksana dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana, tidak kalah pentingnya adalah aspek pendanaan program. Program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan merupakan kebijakan dalam pemberian uang, barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada organisasi kemasyarakatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenTana Tidung berdasarkan Perda APBD. Ketentuan penerima bantuan sosial dilakukan berdasarkan hasil seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) K/L berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) . Pencairan dana belanja bantuan sosial itu yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos atau ke rekening bank/pos penerima. Sedangkan penyaluran barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara pembayaran langsung dari rekening kas umum daerah kepada penyedia barang dan/atau jasa yang telah menandatangani kontrak pengadaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung

Secara umum, pengimplementasian pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung , dapat dikatakan belum optimal bahkan belum menyentuh sasaran penerapan kebijakan tersebut, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan ini di lapangan yang dibagi kedalam 2 (dua) faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat digaris bawahi sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

1) Komunikasi

Menurut salah satu informan kunci kurangnya komunikasi antara Dinas dengan para implementor dibawahnya merupakan penyebab belum disosialisasikannya kebijakan kenaikan pangkat guru tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang anggota Tim Teknis BKN, AH:

“ Disini proses penentuan anggaran bantuan dan hibah belum jelas, sehingga kami sendiri juga kadang bingung. Apalagi proses penganggaran dan penentuan penerimanya, seharusnya kan semua dilibatkan jadi jelas posedurnya ”

Dengan komunikasi yang efektif, diantara para implementor kebijakan diyakini mampu menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dan implementasinya di lapangan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan terdapat perubahan yang signifikan sebagai akibat dari pengimplementasian kebijakan yang baik dan sistematis.

2) Struktur Birokrasi.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi

yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Pada bagian kesejahtraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung, peranan Sekretaris yang relevan dengan batasan permasalahan diantaranya merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas serta merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan semua tugasnya itu dilaporkan kepada Kepala Dinas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua program yang ditetapkan dalam renstra bagian kesejahtraan dan bansos seharusnya sudah melalui SOP yang sudah baku. Hanya saja dalam hal ini berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIB), Ini menunjukkan bahwa bagian kesejahtraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung belum memprioritaskan kebijakan program pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung sebagai hal yang mendesak untuk diimplementasikan.

b. Faktor Pendukung

1) Disposisi/ Sikap Perilaku Implementor

Faktor selanjutnya, merupakan hal yang tak kalah penting dari faktor sebelumnya. Sikap atau perilaku implementor sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam hal kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung melalui pengamatan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para implementor sangat antusias dalam menjalankan kebijakan tersebut. hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu key

informan ketika ditanya apakah dia mengetahui tentang pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, sebagai berikut:

“Hibah dan bansos merupakan sebuah program pemerintah yang bukan urusan wajib. Artinya apabila urusan wajib pemerintah seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat telah terpenuhi, apabila anggaran masih memungkinkan untuk menganggarkan hibah bansos maka hal itu dapat dilaksanakan.”

Dan hampir seluruh implementor mengetahui apa itu pemberian hibah dan bantuan sosial yang sedang berjalan di Kabupaten Tana Tidung, ini artinya bahwa, implementor begitu memahami tujuan dari kebijakan tersebut berikut sanksi yang bisa didapatkan apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan.

Meskipun demikian antusiasme yang ditunjukkan oleh implementor dapat menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan ini akan diterapkan lebih baik lagi dimasa yang akan datang sehingga terwujud pemerataan ekonomi masyarakat yang membawa kepada kesejahteraan rakyat itu sendiri.

2) Sumberdaya

Selanjutnya, dalam permasalahan ini faktor sumberdaya manusia pun (SDM) nampaknya memegang peranan penting. Terbukti dari beberapa kali wawancara dengan informan baik informan kunci maupun informan umum, khususnya para implementor, mereka mengetahui isi kebijakan ini secara umum, sehingga untuk memperjuangkan bagaimana kebijakan ini bisa diimplementasikan begitu serius, didukung dengan para implementor mengetahui sanksi bagi implementor dan penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak menjalankan kebijakan hibah dan bansos ini.

Faktor sarana dan prasarana dapat dilihat cukup memadai dalam mendukung implementasi kebijakan. Sebagai contoh, Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Kabupaten Tana Tidung memiliki ruangan pertemuan yang luas, alat-alat komputer dan multimedia, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor sarana dan prasarana bukanlah menjadi faktor yang dapat menghambat berjalannya implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung.

3) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan peneliti dan didukung oleh data wawancara dengan Bagian Kesejahteraan Sosial dan Bansos di Kabupaten Tana Tidung memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung. Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mendasar dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, oleh karena itu kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Kesejahteraan Sosial dan Bansos di Kabupaten Tana Tidung merupakan faktor pendukung di dalam keberhasilan implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung.

C. Pembahasan

George Edward III (1980) dalam bukunya "*Implementing Public Policy*" membagi 4 faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keempat faktor itu adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokrat dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam penelitian ini ditemukan kekurangan dalam komunikasi diantara Implementor Bagian Kesejahteraan dan Bansos kepada *leading sector* yang berada

dibawahnya, sehingga ditemukan bahwa implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya belum terlaksana dengan baik.

Menurut George Edward III (1980:17)

“The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decision and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Naturally, this communication need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors.”

Edward mengatakan bahwa syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus diteruskan ke personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Tentu, komunikasi ini harus akurat, dan mereka harus akurat dipersepsikan oleh pelaksana. Sehingga, komunikasi ini seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat komunikasi merupakan syarat utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komunikasi ini dibagi lagi oleh Edward III dalam 3 dimensi yaitu Dimensi *Transmission* (Transmisi/ pemindahan/ penyebaran informasi), Dimensi *Clarity* (Kejelasan) dan Dimensi *Consistency* (Kekonsistenan).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara

jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa dalam proses implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, Implementor bagian Kesejahteraan dan Bansos Kabupaten Tana Tidung harus memperhatikan ketiga dimensi di atas agar proses komunikasi bisa berjalan dengan baik sehingga implementasi kebijakan bisa diterapkan secara akurat dan tepat sasaran.

2. Sumberdaya

Edward III (1980:10) menyatakan bahwa “ *No matter how clear and consistant implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective* . Pernyataan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut : “Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif.” Dari hasil penelitian, dapat ditabulasi jenis-

jenis sumberdaya yang dibutuhkan demi kelancaran implementasi kebijakan.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980:54) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III (1980:62) menambahkan *“Lack of management skills is an even greater problem at the state and local levels.”* Ditambahkan pula oleh Edward III (1980:79) *“Skill as well as numbers is an important characteristic of staff for implementation. All too often public officials are lacking in the expertise both substantive and managerial, needed to implement policies effectively.”*

Pernyataan Edward III diatas tentang sumberdaya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf menunjukkan bahwa sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, Bagian Kesejahteraan dan Bansos Kabupaten Tana Tidung memiliki implementor yang tidak begitu memahami permasalahan kebijakan. Namun demikian semangat implementor yang bertekad akan terus memperbaiki implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung patut di dukung dan di apresiasi oleh stake holder. Kendala selanjutnya pada sumberdaya manusia adalah kurangnya keterampilan manajemen. Menurut Edward III, ini merupakan masalah yang lebih besar di tingkat negara bagian dan lokal. Stakeholder harus mampu menyiapkan staf yang mumpuni dalam melaksanakan tugas implementasi kebijakan. Kepiawaian staf dalam melakukan tugasnya menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan kenaikan

pangkat guru secara efektif.

b. Sumberdaya Anggaran

Edward III (1980:82) menyatakan dalam kesimpulan studinya “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara dengan beberapa stake holder, kebanyakan menyebutkan lancarnya anggaran sehingga sosialisasi tentang pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung sering dilakukan. Hal ini sesuai dengan kesimpulan George Edward III di atas.

c. Sumberdaya Peralatan

Edward III (1980:77) menyatakan :

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.” Pernyataan Edward III ini, jika dialihbahasakan sebagai berikut:

”Fasilitas fisik juga mungkin sumber daya kritis dalam implementasi. Seorang implementor mungkin memiliki staf yang cukup, dapat memahami apa yang seharusnya ia lakukan, mungkin memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, tapi tanpa bangunan yang diperlukan, peralatan, perlengkapan dan bahkan pelaksanaan ruang hijau tidak akan berhasil.” Sehingga jelas bahwa

tersedianya fasilitas menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pengamatan penulis, bagian kesejahteraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam mendukung tugas-tugas Bagian Kesejahteraan dan bansos di Kabupaten Nunukan. Sehingga dapat dikatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tidak memiliki masalah pada bidang sarana dan prasarana.

Edward III (1980:82) mengatakan bahwa *“A lack of essential building, equipment, supplies, or land can hinder policy implementation as much as can inadequacies in the other resources we have examined.”*

Pentingnya masalah sarana dan prasarana ini dalam mensukseskan implementasi kebijakan publik, sehingga kekurangan sarana dan prasarana itu bisa menjadi setara dengan faktor utama lainnya.

3. Disposisi

Edward III (1980:11) menjelaskan di dalam bukunya *“Implementing Public Policy”*,

“The dispositions or attitudes of implementor is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.”

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin dilaksanakan secara efektif, tidak hanya harus pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut hasil penelitian, tingkat keseriusan penanganan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung mungkin perlu di tingkatkan lagi mengingat kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial ini memiliki tujuan dan latar belakang yang sangat serius demi kemajuan dan kesejahteraan di Negara Indonesia.

Edward III (1980:90) melanjutkan penjelasannya:

“Many policies fall within a “zone of indifference”. These policies probably be implemented faithfully because implementor do not have strong feeling about them. Other policies, however, will be in direct conflict with the policy views or personal or organizational interests of implementors. When people are execute orders with which they do not agree, inevitable occur between policy decisions and performance. In such cases implementor will exercise their discretion, sometimes in subtle ways, to hinder implementations.”

Dalam studi kasus pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, menurut pengamatan penulis, sikap implementor bukannya ingin menghalangi implementasi kebijakan ini, hanya saja komitmen kuat yang diperlukan dari para implementor. Kata “Desire” yang digunakan oleh Edward III dapat dikatakan merujuk pada “gairah” atau mungkin keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Struktur Birokrasi

Edward III (1980:11) menegaskan bahwa:

“Even in sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure.”

Bahkan dalam sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan eksis dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi mungkin masih bisa gagal karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Edward III (1980:125) mengidentifikasi karakteristik yang paling

menonjol dari birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi.

a) *Standard Operating Procedure (SOP)*

SOP merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai publik untuk mempermudah dalam pembuatan keputusan yang banyak setiap hari. Kelebihan dari penerapan SOP diantaranya adalah penghematan waktu, lebih mudah untuk mengantisipasi kejadian yang berlangsung diluar dugaan dan untuk kepentingan keseragaman.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya SOP dalam implementasi kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka hal pertama dan utama yang harus dilakukan adalah penyampaian informasi atau sosialisasi, kemudian diikuti oleh pelatihan, implementasi program kebijakan dan yang terakhir adalah evaluasi.

Bagian kesejahteraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung dalam hal ini sebagai implementor kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial harus membuat SOP sehingga kegiatan implementasi program dapat berjalan lancar, kesalahan dapat diminimalisir dan melalui evaluasi program dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus.

b) *Fragmentasi*

Definisi fragmentasi menurut Edward III (1980: 134):

“Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organization units.”

Bila dialih bahasakan pengertian Fragmentasi adalah penyebaran/pembagian tanggung jawab untuk area kebijakan antara beberapa unit organisasi.

Edward III (1980:137) selanjutnya menuliskan bahwa:

“Fragmentation implies diffusion of responsibility, and this makes coordination of policies difficult. The resources and authority necessary to attack a problem comprehensively are often distributed among many bureaucratic units.”

Fragmentasi menyiratkan difusi tanggung jawab, dan ini membuat koordinasi kebijakan yang sulit. Sumber daya dan wewenang yang diperlukan untuk menyerang masalah komprehensif sering didistribusikan di antara banyak unit birokrasi, sehingga menjadi tidak fokus dan mengambang.

Dalam penelitian ini, tidak terlihat bagian kesejatraan dan bansos memiliki struktur organisasi yang lengkap, sehingga bisa dikatakan implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial kurang berjalan lancarnya.

5. Implementasi Kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial ini hampir terpenuhi, walaupun masih ada lapisan masyarakat yang belum mengetahui program ini. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan program hibah dan bantuan sosial telah mencapai tujuan ? dapat dikatakan bahwa tujuan Hibah dan bantuan sosial belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Hibah bantuan sosial. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah

perbatasan adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Sesayap , yaitu pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan

6. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clarity, consistency. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan program hibah dan bantuan sosial belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai program hibah dan bantuan sosial kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial maupun dalam pengawasan kegiatan.

7. Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut : ” Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif ”

Sesuai dengan pernyataan di atas Islami (1998:34) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technological resources*, maupun *psychological resources*.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan program hibah dan bantuan sosial dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial.
- c. kelengkapan sarana/prasarana dalam mendukung kebijakan program hibah dan bantuan sosial.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan program hibah dan bantuan sosial.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para penerima hibah dan bantuan sosial, sehingga pemahaman pelaksana mengenai hibah dan bantuan sosial kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan organisasi yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

8. Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut : “ Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit”.

Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan program hibah dan bantuan sosial. Hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan program hibah dan bantuan sosial.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah nyata dari pelaksana program hibah dan bantuan sosial, berupa penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana program hibah dan bantuan sosial yang menganggap kebijakan program hibah dan bantuan sosial adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

9. Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan

bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim yang mengelola dana hibah dan bantuan sosial. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pengelola hibah dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana pengelola hibah dan bantuan sosial.

10. Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi, atau semua yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (*general environment*) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan lingkungan khusus (*specific environment*) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan. (Robbins, dalam Keban, 2004: 163).

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh Ian Mitroff (Keban 2004 : 170) yang menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain merupakan (1) kumpulan stakeholders internal dan eksternal; (2) setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu dengan lain; (3) yang memiliki network antara satu dengan yang lain; (4) perubahan strategi akan menggeser

hubungan antar stakeholders; (5) hubungan antara setiap stakeholders dapat bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat, dsb; dan (6) kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan terakhir dengan stakeholders.

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kapasitas kelompok dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan program hibah dan bantuan sosial berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan hibah oleh kelompok penerima hibah serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan hibah.
- b. Budah berperannya kelompok penerima dalam ikut mengawasi pelaksanaan hibah maupun bantuan sosial.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan kegiatan penerima hibah.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung berjalan cukup lancar. Walaupun masih belum dilakukan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku tetapi hampir semua tahap kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial sudah dilaksanakan.
2. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kenaikan pangkat guru di Kabupaten Nunukan yaitu Faktor Penghambat yang terdiri dari Komunikasi, Struktur Birokrasi. Sedangkan Faktor Pendukung Implementasi adalah Disposisi/ Sikap Perilaku Implementor, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan Program hibah dan bantuan sosial di masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :

1. Perlu adanya upaya yang serius dalam mengatasi permasalahan implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan sosial di

Kabupaten Tana Tidung oleh Dinas bagian kesejahteraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung, Para pelaksana dan penerima Program hibah dan bantuan sosial harus diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis khususnya pada staf bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Keuangan, dan para penerima bantuan dana hibah dan bansos khususnya yang menyangkut pengelolaan, penatausahaan, monev dan tatacara pembuatan laporan pertanggungjawaban.

2. Untuk mencegah terjadinya korupsi dan nepotisme dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di kabupaten Tana Tidung perlu diterapkan sebuah sistem transparansi publik secara online yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik lembaga formal seperti BPK, BPKP, KPK, Kepolisian, Kejaksaan maupun lembaga non formal yang bergerak di bidang anti korupsi.
3. Dinas bagian kesejahteraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, agar didapatkan formulasi dan instrument yang tepat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama
- Dunn, William. 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. USA: Congressional Quarterly Press
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Mariyam Musawa, 2009. *Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang*. Tesis. Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Moleong, Lexy J. (1996) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (3).
- PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 7.
- Prasetyo (2014), "Implementasi Program Bantuan Hibah bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelulor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". Fisipol Univesitas Wijaya Putra Surabaya
- Prastama, Suryono, Wachid (2010). " Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat". Jurnal

Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal. 281-289. Universitas Brawijaya Malang

- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Sitanggang, Tangdililing, Maryuni (2014), Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono. 2010. *Analisis kebijakan Publik*. Jokjakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Nasional. Bandung: Afabeta
- Surachmad, Winarno. 1978. Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung : Tarsito.
- Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab, Solihin. A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
- Yashin, Sulcahn. 1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru. Surabaya: Amanah

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan :

a. Nama :

b. Jenis Kelamin :

c. Suku :

d. Agama :

e. Alamat :

f. Usia :

g. Status :

h. Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/ lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?
10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?

Tideng pale, 28 April 2016

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

- a. Nama : Drs. M. Yusuf badrun, M. AP
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Suku : Bulungan
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Jl. Perintis, RT. VI, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap
- f. Usia : 54 Tahun
- g. Status : Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : Strata 2

Pertanyaan :

12. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Hibah dan bansos merupakan sebuah program pemerintah yang bukan urusan wajib. Artinya apabila urusan wajib pemerintah seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat telah terpenuhi, apabila anggaran masih memungkinkan untuk menganggarkan hibah bansos maka hal itu dapat dilaksanakan
13. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
Kalau Program Hibah Bansos untuk Tana Tidung tahun ini hanya bersifat rutinitas, artinya kalau hibah masih diberikan kepada ormas yang dapat secara langsung membantu percepatan program pemerintah sedangkan bansos biasanya untu beasiswa, biaya berobat serta antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang tidak direncanakan.
14. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Sosialisasi terkait Program Hibah dan Bansos di kabupaten Tana Tidung sudah dilakukan dengan tujuan Agar masyarakat lebih tahu mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana hibah dan bansos agar nantinya tidak terjadi kesalahan.

15. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Melihat dari banyaknya temuan dari BPK dan kurangnya pengusul terhadap program hibah dan bansos menunjukkan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami atau bahkan belum mengerti adanya program ini.
16. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Pemerintah dengan segala keterbatasannya selalu menyampaikan program hibah dan bansos, baik dalam acara kunjungan kerja pemerintah daerah maupun dari reses DPRD selaku wakil rakyat
17. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Kalau berkaca dari hasil audit dan Rekomendasi BPK menunjukkan kurang fahaman para pengusul maupun penerima bantuan hibah dan bansos.
18. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Sebagaimana diatur di permendagri 32 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan permendagri 39 tahun 2012 disitu telah diatur mekanismenya.
19. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Terkait persyaratan penerima hibah dan bansos silahkan dilihat di permendagri sebagaimana saya sebutkan tadi.
20. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?
Saya rasa kriteria penerima hibah dan bansos sangat tidak jauh berbeda, hanya saja kalau hibah lebih kepada ormas/LSM yang punya kontribusi dalam membantu pemerintah melaksanakan program kegiatan sementara bansos lebih dititik beratkan kepada orang yang kurang mampu dan berdampak social.
21. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi
22. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?
Kalau kendala sih biasanya banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban dan ketidak fahaman penerima terkait perlunya membuat laporan

Tideng pale, 28 April 2016

Drs. H. M. Yusuf Badrun, M. AP

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

- a. Nama : Uus Rusmanda, A. Ks, M.HP
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Suku : Sunda
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Jl. Agis Pulak, RT. II, Desa Sepala Induk, Kecamatan Sesayap Hilir
- f. Usia : 45 Tahun
- g. Status : Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : Strata 2

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Hibah dan bansos adalah program yang bukan urusan wajib pemerintah. Boleh dianggarkan boleh juga tidak.
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung Ka
Setahu saya Hibah Bansos untuk Tana Tidung tahun ini ada untuk beasiswa, bantuan berobat, dan bantuan kepada ormas
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kalau Sosialisasi terkait Program Hibah dan Bansos sudah mulai berjalan
4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Ada yang faham ada juga yang masih kurang faham dan tidak tau kalau ada program hibah dan bansos
5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Biasanya kalau Bupati kunjungan kerja sering menyampaikan program tersebut.
6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?

Sudah sesuai walaupun masih ada beberapa kekurangan

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Penyusunan dan anggaran untuk hibah dan bantuan sosial di sini dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dimana penyusunannya melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah.
8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Kalau kriteria harus terdaftar di kesbangpol, berbadan Hukum dan memiliki sekretariat tetap
9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/ lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?
Persyaratannya silahkan lihat dipermendagri 32 dan 39 tahun 2012
10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi
11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?
Kalau kendala sih biasanya banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

Tideng pale, 25 April 2016

Uus Rusmanda, A. Ks, M. HP

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

- a. Nama : H. Usnan, SE
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Suku : Banjar
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap
- f. Usia : 52 Tahun
- g. Status : Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : Strata 1

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos adalah program yang merupakan program bukan urusan wajib pemerintah
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Setahu saya ada Hibah untuk ormas, Bansos untuk beasiswa, berobat dan bansos yang tidak direncanakan.
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kalau Sosialisasi terkait Program Hibah dan Bansos sepertinya sudah berjalan.
4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Kalau persoalan itu saya kurang tau, silahkan ditanyakan ke bagian yang menangani
5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Saya rasa sangat baik
6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Disini proses penentuan anggaran bantuan dan hibah belum jelas, sehingga kami sendiri juga kadang bingung. Apalagi proses penganggaran dan penentuan penerimanya, seharusnya kan semua dilibatkan jadi jelas posedurnya

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Terkait mekanisme Hibah Bansos silahkan dilihat di permendagri 32

8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?

Kalau kriteria penerima harus minimal sudah 3 tahun berdiri kalau yayasan.

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/ lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?

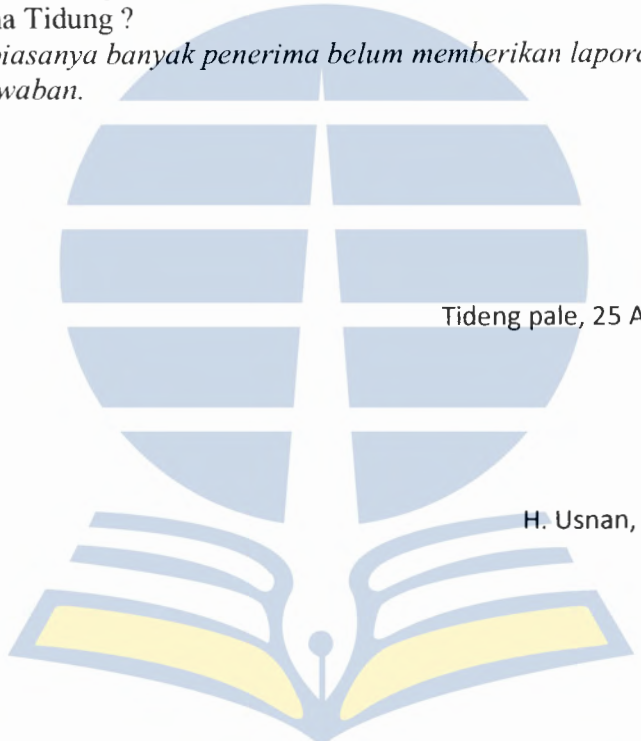
Kalau rincinya saya kurang ingat.

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?

Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?

Temuan BPK biasanya banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban.



Tideng pale, 25 April 2016

H. Usnan, SE

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

- a. Nama : Jafri, A. Md
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Suku : Tidung
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap
- f. Usia : 46 Tahun
- g. Status : Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : Diploma. 2

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos adalah program yang dapat dianggarkan oleh Pemda dengan mengacu pada aturan yang berlaku.
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Setahu saya ada Hibah untuk ormas/OKP/LSM, rumah ibadah dan Bansos untuk beasiswa, berobat dan dana tak terduiga
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Sosialisasi pemanfaatan hibah dan bansos ini dinilai sangat penting bagi masyarakat selaku penerima bantuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dana hibah dan Bansos. Sosialisasi ini juga bertujuan guna meminimalisir beberapa permasalahan yang sering terjadi di antaranya, kurang pemahannya masyarakat mengenai dana hibah. Kemudian, pola pikir masyarakat bahwa dana hibah dan Bansos adalah hak yang tidak perlu laporan pertanggung jawaban. Belum optimalnya fungsi SKPD teknis dalam hal proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban hibah dan Bansos serta penggunaan yang tak sesuai dengan proposal.

4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Ada yang tau ada juga yang tidak
5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Kalau komunikasi sudah sering disampaikan kepada masyarakat Tana Tidung
6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Masih terdapat kekeliruan dan tidak sesuai aturan yang berlaku
7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Mekanisme Pemberian hibah dan bansos sudah berjalan baik walaupun masih terdapat kekeliruan
8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Minimal berbadan hukum, memiliki sekretariat tetap, dan berdomisili di Kabupaten Tana Tidung
9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/ lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?
Tentang persyaratan hibah dan bansos sebagaimana saya jelaskan tadi, hanya saja kalau bansos lebih kepada masyarakat kurang mampu
10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi
11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?
Banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

Tideng pale, 4 April 2016

Jafri, A. Md

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

- a. Nama : Linda Safitri, S. Pi
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Suku : Tidung
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Jl. Sebidai, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap
- f. Usia : 30 Tahun
- g. Status : Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : Strata. 1

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos adalah program yang merupakan bukan urusan wajib Pemerintah, maksudnya adalah bahwa apabila pemerintah telah menganggarkan urusan wajib seperti Gaji PNS, anggaran Kesehatan, Pendidikan, maka pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program hibah dan bansos.
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Hibah tahun ini lebih sering diperuntukkan untuk ormas/OKP/LSM/organisasi keolahragaan nirlaba, sedangkan bansos diprogramkan untuk beasiswa, bantuan berobat, dan kejadian yang tidak direncanakan.
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kegiatan sosialisasi sering disampaikan Kepada calon penerima hibah bahwa monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos tersebut akan dilakukan oleh BPK, jika hasilnya terdapat penggunaan dana hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan usulan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, jadi penerima hibah dan bansos harus betul-betul menggunakan dana itu untuk kegiatan yang diusulkan sesuai dengan proposal.
4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Mungkin bisa bervariasi, ada yang tau da nada juga yang tidak tau.

5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Terkait Komunikasi Penerima Hibah dan bansos sudah sering disampaikan pemerintah daerah, baik melalui kegiatan kunjungan kerja maupun melalui media online
6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Menurut saya sudah sesuai akan tetapi masih perlu dilakukan perbaikan maupun evaluasi
7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Mekanisme Pemberian hibah dan bansos di Tana Tidung sudah baik namun perlu dilakukan perbaikan untuk kesempurnaan program ini.
8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Kalau kriteria untuk penerima hibah dan bansos setau saya harus berdomisili di tana tidung, berbadan hukum, memiliki sekretariat tetap, kalau penerima bansos biasanya memberikan surat keterangan tidak mampu kalau untuk berobat, dan bantuan beasiswa harus benar-benar terdaftar sebagai mahasiswa diperguruan tinggi/universitas, dan persyaratan lainnya
9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/ lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?
Syarat dan kriteria penerima hibah dan bansos sama dengan penjelasan saya tadi
10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi
11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?
Banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

Tideng pale, 4 April 2016

Linda Safitri, S. Pi

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

- a. Nama : Neijon Hermandes
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Suku : Batak
- d. Agama : Kristen Protestan
- e. Alamat : Jl. Sebidai, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap
- f. Usia : 32 Tahun
- g. Status : Belum Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : Strata. 1

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos sepengetahuan saya adalah program pemberian oleh pemerintah baik berupa uang, barang maupun jasa.
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Hibah dan bansos biasanya diberikan kepada organisasi yang mempunyai kaitan ataupun hubungan yang dapat membantu percepatan program pemerintah tana tidung, sekaligus memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kegiatan sosialisasi sudah mulai giat dilakukan setiap tahun agar masyarakat tahu kalau pemerintah ada program hibah dan bansos.
4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Mungkin ada yang tau dan tidak tau.
5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Menurut saya sudah maksimal
6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?

Sebaiknya penyaluran dan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan sesuai prosedur yang ada. Prosedur kerja program hibah dan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang meliputi penentuan kuota, penyeleksian, penetapan, penyaluran, sehingga bisa adil

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Mekanisme Pemberian hibah dan bansos adalah mengacu kepada permendagri 32 dan 39.

8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?

Kalau kriteria untuk penerima hibah dan bansos biasanya sudah terdaftar di Kesbang Linmas dan Pol PP, ada badan hukumnya, minimal sudah berdiri selama 3 tahun. Kalau Bansos sih biasanya hanya untu orang kurang mampu dengan syarat membuat SKTM.

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?

Kriteria dan syarat penerima hibah dan bansos saya rasa kurang lebih aja

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?

Sudah lumayan baiklah daripada tahun sebelumnya.

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?

Banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban karena mereka belum tau cara membuat laporan sesuai standar laporan Keuangan.

Tideng pale, 7 April 2016

Neijon Hermandes, A. Md

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

- a. Nama : Sulaiman
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Suku : Tidung
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia
- f. Usia : 38 Tahun
- g. Status : Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : SMP

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos yang pernah saya dengar adalah bantuan kepada masyarakat
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Saya nda tau Pak
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Dulu pernah dilakukan disini Pak, tapi kami belum terlalu tau maksudnya
4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Sedikit aja yang tau pak
5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Memang pernah disampaikan Bupati tana Tidung waktu meliat-liat pembangunan disini
6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2014 di KTT, menurut saya sedikit bermasalah, karena kami masyarakat awam ini tidak mengetahui informasi program tersebut dengan jelas, kami juga tidak tahu kalau ada bantuan

dari pemerintah, jangankan menerima tahu kegiatannya dan cara mengajukannya saja tidak, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dapat bantuan pak.

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Saya nda tau pak

8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?

Biasanya kalo kami atau warga sakit kami diminta buat surat keterangan tidak mampu dari desa

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/ lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?

Tidak tau saya pak

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?

Biasanya ada juga kelompok masyarakat yang dapat bantuan tapi saya kurang tau penyalurannya

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?

Katanya banyak yang tidak membuat laporan

Tanah Merah, 30 April 2016

Sulaiman

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

- a. Nama : Basri
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Suku : Tidung
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Desa Rian, Kecamatan Muruk Rian
- f. Usia : 29 Tahun
- g. Status : Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : SMP

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Wah mas...saya malah baru tau kalau ada program bantuan hibah dan bantuan sosial, setau saya hanya BLT jamannya pak SBY dulu..ada bantuan untuk usaha kecilkah, kalau ada kami mohon informasinya.
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Saya kurang tau pak kalo programnya
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kami dulu pernah ikut sosialisasi di desa kami pak yang dilaksanakan oleh bagian sosial
4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Mungkin ada yang tau, , ada juga yang nda tau
5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Kalo itu saya nda tau Pak, karena saya belum pernah menerima
6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Maaf pak saya nda tau aturan yang begitu pak

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Saya belum pernah mengajukan pak, makanya saya nda tau

8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?

Saya pernah liat tetangga saya sakit dan dia membuat surat tidak mampu dari kades kami pak

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/ lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?

Tidak tau saya pak

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?

Nda tau saya pak

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?

Kalo kendalanya mungkin kami belum tau cara mengusul bantuan



Muruk Rian 9 April 2016

Basri

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

I. Identitas Informan

- a. Nama : Hamid
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Suku : Bugis
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia
- f. Usia : 47 Tahun
- g. Status : Menikah
- h. Pendidikan Terakhir : SMP

Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Bantuan Pemerintah
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Saya kurang tau Pak
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kadang-kadang saya ikut sosialisasi Pak
4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Pak, kami sangat tertarik dengan program bantuan yang diberikn pemerintah. Saya ketua kelompok tani di UPT Sambungan. Sejak saya tinggal disini saya atau kelompok tani saya belum pernah menerima bantuan tersebut, mendengar ada bantuan si iya....tapi menerima belum pernah, karena kami tidak tau tata caranya.
5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan bantuan sosial?
Kami nda tau kalau hal itu

6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Saya kurang mengerti mekanismenya pak
7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kurang tau Pak
8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Biasanya membuat surat keterangan dari RT dan kepala desa
9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/ lembaga mendapatkan hibah dan bantuan sosial ?
Tidak tau saya pak
10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Saya kan belum pernah mengusulkan pak
11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos Kabupaten Tana Tidung ?
Kalo kami di Tana Merah ini pak jauh dari kabupaten sehingga kami butuh biaya untuk kesana pak

Tanah Merah, 19 April 2016

Hamid